



DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN DEMAK

2025 - 2029 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)



☎ (0291) 685745

✉ dinsosp2pa@demakkab.go.id

🌐 dinsosp2pa.demakkab.go.id

📷 [dinsosp2pa_demak](https://www.instagram.com/dinsosp2pa_demak)

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan strategik merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban.

Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi di masa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis. Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak. Atas dasar tersebut maka Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khususnya bidang Sosial dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak , agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Pemerintah Kabupaten Demak melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINSOS P2PA) memiliki tanggung jawab strategis dalam meningkatkan kesejahteraan social masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti perempuan , anak, penyandang disabilitas, dan lansia. Dalam menghadapi dinamika social, ekonomi, dan budaya yang terus berkembang , serta tantangan globalisasi dan perubahan iklim dibutuhkan perencanaan yang matang dan terarah agar kebijakan dan program yang dijalankan benar – benar berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinsos P2PA Kabupaten Demak ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Dalam Jangka Menengah, serta merupakan instrument penting dalam memastikan sinergi dan keterpaduan antara program pusat, provinsi dan kabupaten. Renstra ini juga disusun untuk menyesuaikan arah kebijakan dengan dokumen perencanaan lain seperti RPJMD Kabupaten Demak, RPJMN, serta regulasi nasional yang mengatur bidang sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Lebih dari itu, penyusunan Renstra Dinsos P2PA ini menjadi penting sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi , dan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan di bidang sosial dan perlindungan masyarakat . Dalam prosesnya penyusunan Renstra ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif dan berbasis data, agar mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat dan tantangan pembangunan ke depan secara tepat sasaran.

Dengan adanya Renstra ini, diharapkan Dinsos P2PA Kabupaten Demak mampu menjadi institusi yang responsive, adaptif, dan inovatif dalam melindungi dan memberdayakan masyarakat, khususnya kelompok marginal dan rentan sehingga dapat terwujud masyarakat Demak yang sejahtera, inklusif dan berkeadilan sosial.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 15. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Sosial Tahun 2020 – 2024 ;

16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020 – 2024;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor xx Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2029;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2045;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor xxx Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2029.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak ;
25. Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak ;
26. Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Resiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak ;
27. Perbub No 1 tahun 2025 tentang system kerja utk penyederhanaan birokrasi .

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan dan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak adalah sebagai dasar dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mulai dari tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak ;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Demak khususnya bidang Sosial dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kerja (Renja PD) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak disusun dengan sistematika berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak , sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Sosial , Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak . Selain itu juga memuat permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi Dan Arah Kebijakan

Berisi tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak tahun 2025-2029. Serta strategi dan kebijakan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029.

BAB IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi program, kegiatan, dan subkegiatan yang disertai kinerja, indikator, target dan pagu indikatif. Uraian subkegiatan mendukung program prioritas pembangunan daerah. Selain itu juga memuat Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), yang disertai kondisi awal kinerja, dan kondisi akhir kinerja yang berhubungan dengan indikator kinerja daerah dalam RPJMD.

BAB V Penutup

Kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2. 1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Kabupaten Demak Nomor 69 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak, tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Sosial dan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak mempunyai fungsi:

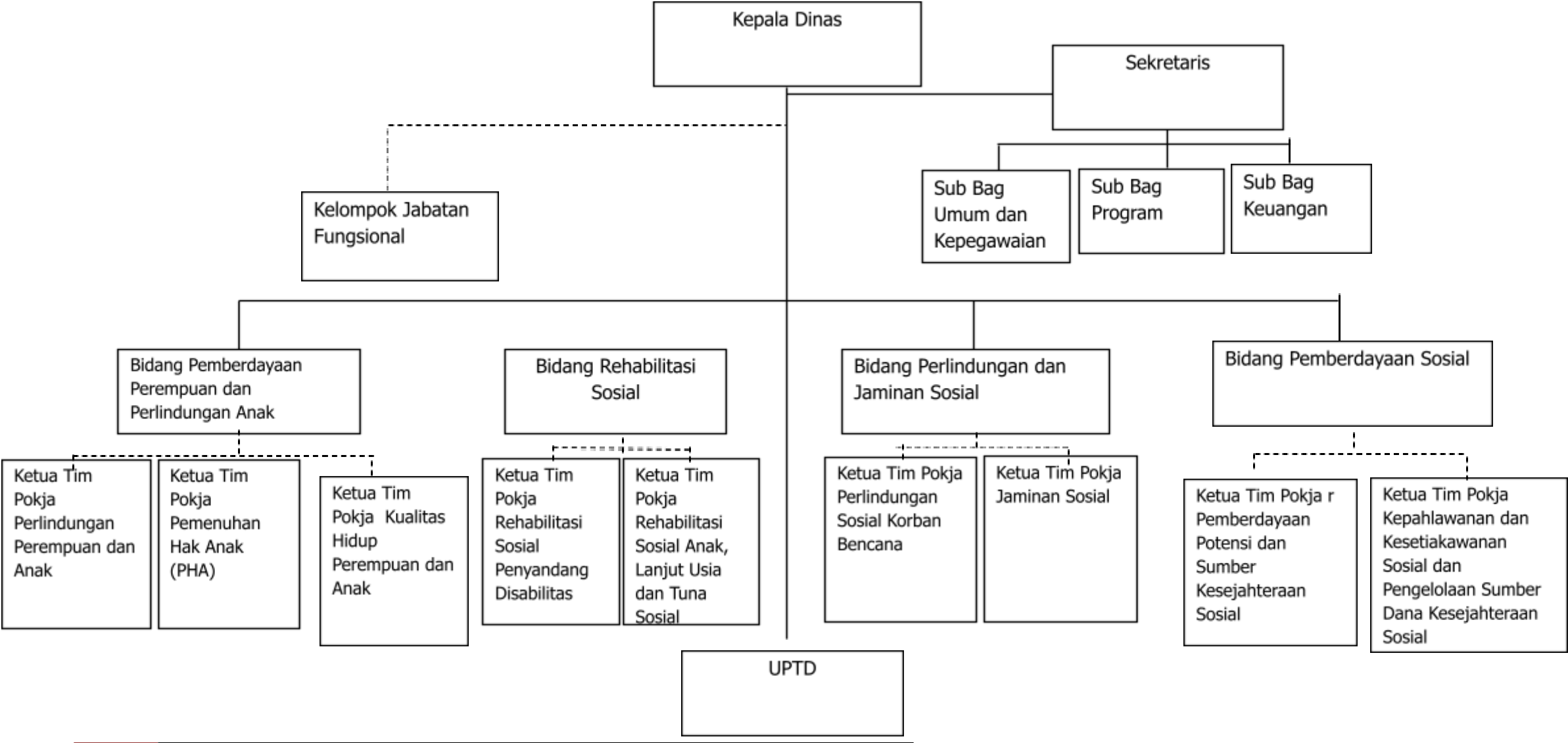
1. Perumusan kebijakan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

a. Struktur Organisasi

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

Gambar 2.1

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN DEMAK



b. Uraian Tugas dan Jabatan Struktural Dinas Sosial P2PA Kabupaten Demak

Uraian tugas jabatan struktural Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak adalah sebagai berikut:

Dalam melaksanakan Tugas Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak adalah

1. Sekretariat Dinas, melakukan fungsi :
 - a) penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
 - b) penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - c) penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Dinas;
 - d) penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
 - e) penyiapan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
 - f) penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
 - g) penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas;
 - h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, melaksanakan fungsi :
 - a) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perlindungan Sosial Korban Bencana;
 - b) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Jaminan Sosial;
 - c) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin melaksanakan fungsi:
 - a) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
 - b) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kepahlawanan, Kesetiakawanan dan Pengelolaan Sumber Dana Kesejahteraan Sosial;

- c) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Penanganan Fakir Miskin;
- d) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Bidang Rehabilitasi Sosial melaksanakan fungsi:

- a) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas;
- b) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Rehabilitasi Sosial Anak, Lanjut Usia dan Tuna Sosial;
- c) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan fungsi:

- a) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga;
- b) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- c) penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di Bidang Kualitas Hidup Anak;
- d) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.2. Sumber Daya Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak

Sumberdaya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi tersebut.

a. Sumberdaya Manusia

Sumberdaya manusia pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak diklasifikasikan ke dalam pendidikan dan golongan. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

di Dinsos P2PA Kabupaten Demak Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	PNS		PPPK		NonASN		Jumlah
		L	P	L	P	L	P	
1	SD	-	-	-	-	1	0	1
1	SMP Sederajat	0	0	0	0	2	0	2
2	SMA Sederajat	3	3	1	0	15	4	26
3	D3	0	1	2	0	0	1	4
4	S1	2	7	5	7	4	7	32
5	S2	3	3	0	0	0	0	6
6	S3	0	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	8	14	8	7	22	12	71

Berdasarkan kualifikasi golongan, pegawai di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak terdiri atas laki-laki sejumlah 38 orang dan perempuan sejumlah 33 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3.
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan dan jenis kelamin
di Dinsos P2PA Kabupaten Demak Tahun 2025

No	Golongan	L	P	Jumlah
1	Non ASN	22	12	34
2	PPPK	8	7	15
3	PNS Golongan II	2	3	5
4	PNS Golongan III	4	10	14
5	PNSGolongan IV	2	1	3
	Jumlah	38	33	71

Berdasarkan tabel diatas jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin di Dinsosp2pa Kab.Demak tahun 2025 berjumlah 71 pegawai dengan 38 laki-laki dan 33 perempuan dengan demikian, rasio jenis kelamin laki-laki terhadap perempuan sekitar 1,15% ini menunjukan jumlah pegawai laki-laki lebih dominan dari pegawai perempuan. Kemudan Jumlah pegawai berdasarkan golongan Non ASN yang paling tinggi sebanyak 34 orang, pppk 15 orang , golongan III sebanyak 14 orang, golongan II sebanyak 5 orang dan terakhir golongan IV sebanyak 3 orang.

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak . Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berasal dari APBD maupun APBN, dsb dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.4.

Aset Tanah Dinas Sosial P2PA Kabupaten Demak

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengada an	Letak/ Alamat	Status Tanah			Pengguna an	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1.	Tanah kampung	4028	1985	Jl. Kyai Singkil No.42 Demak	Hak pakai	11/21/1986	B 2140537 (HP 34)	Kantor DinsosP2PA Kab.Demak	Pembelia n	330,296	Bukti Sertifikat
2.	Tanah kampung	1856	1990	Jl. Pemuda	Hak pakai	08/09/2021	11.09.12 .18.4.00 074	Taman Makam Pahlawan Cahya Ratna Bintarum	Pembelia n	1,875,000	Bukti Sertifikat
3.	Tanah kampung	5172	1998	Jl. Pemuda Demak	Hak pakai	23/09/1986	B 2139964 (HP 33)	Uptd Rumpelsos	Pembelia n	791.252	Bukti Sertifikat
4.	Tanah kampung	344.96	2022	Desa Katonsari Belakang Timbanga n	Hak pakai	-	Proses	Panti Asuhan	Hibah	68,992	BA Penilaian no 030/669 Tahun 2022

Tabel 2.5

Gedung dan Bangunan Dinas Sosial P2PA Kabupaten Demak

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen (LBK)	Baik	423	Jl. Sultan Trenggono	423	Tanah Milik Pemda	Pembelian	299,535,000
2.	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Rumpelsos)	Baik	5172	Jl. Pemuda Demak	5172	Tanah Milik Pemda	Pembelian	49,775,000
3.	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Dinsos P2PA)	Baik	650	Jl. Kyai Singkil No.42 Demak	650	Tanah Milik Pemda	Pembelian	177,579,000
4.	Pintu Pagar (Dinso P2PA)	Baik	20	Jl. Kyai Singkil No.42 Demak	20	Tanah Milik Pemda	Pembelian	49,655,000
5.	Bangunan Gedung Lain-lain (Dinso P2PA)	Baik	60	Jl. Kyai Singkil No.42 Demak	60	Tanah Milik Pemda	Pembelian	68,601,000

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
6.	Bangunan Gedung Lain-lain (Dinso P2PA)	Baik	170	Jl. Kyai Singkil No.42 Demak	170	Tanah Milik Pemda	Pembelian	3,200,000
7.	Bangunan Gedung Lain-lain (Dinso P2PA)	Baik	160	Jl. Kyai Singkil No.42 Demak	160	Tanah Milik Pemda	Pembelian	68,000,000
8.	Pintu Pagar (Dinso P2PA)	Baik	50	Jl. Kyai Singkil No.42 Demak	50	Tanah Milik Pemda	Pembelian	91,738,000
9.	Gedung Garasi/Pool Permanen (Dinso P2PA)	Baik	170	Jl. Kyai Singkil No.42 Demak	170	Tanah Milik Pemda	Pembelian	3,200,000
10.	Gedung Garasi/Pool Permanen (Dinso P2PA)	Baik	18	Jl. Kyai Singkil No.42 Demak	18	Tanah Milik Pemda	Pembelian	64,530,000

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
11.	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Dinso P2PA)	Baik	270	Jl. Kyai Singkil No.42 Demak	270	Tanah Milik Pemda	Pembelian	790,124,000
12.	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Dinso P2PA)	Baik	90	Jl. Kyai Singkil No.42 Demak	90	Tanah Milik Pemda	Pembelian	199,220,000
13.	Bangunan Pembakaran Bangkai Lain-lain (Komposter)	Baik	2	Jl. Kyai Singkil No.42 Demak	2	Tanah Milik Pemda	Hibah	4,140,530
14.	Konstruksi Pagar (Pagar Kelining Dinsos)	Baik	256	Jl. Kyai Singkil No.42 Demak	256	Tanah Milik Pemda	Pembelian	416,170,000
15.	Konstruksi Pagar (Pagar Halaman Dinsos)	Baik	60	Jl. Kyai Singkil No.42 Demak	60	Tanah Milik Pemda	Pembelian	198,820,000

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
16.	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Gedung SLRT)	Baik	120	Jl. Kyai Singkil No.42 Demak	120	Tanah Milik Pemda	Pembelian	198,930,000
17.	Bangunan Gedung Kantor Permanen (Pembangunan Rumah Singgah)	Baik	268	Jl. Kyai Singkil No.42 Demak	268	Tanah Milik Pemda	Pembelian	1,413,811,000
18.	Bangunan Tempat Kerja Lain-Lain (Paving)	Baik	20	Jl. Kyai Singkil No.42 Demak	20	Tanah Milik Pemda	Pembelian	45,490,000

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial P2PA Kabupaten Demak

Capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Dinas Sosial P2PA Kabupaten Demak dari tahun 2022 – 2025 dipergunakan untuk perlindungan sosial ekonomi melalui jaminan ketenagakerjaan, penanggulangan bencana (banjir, kebakaran dan bencana alam lain) dengan bantuan logistik dan dapur umum, Perlindungan anak melalui pelatihan dan pencegahan kekerasan dan Dukungan lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS / LKSA). Pelaksanaannya melibatkan kolaborasi lintas sector seperti BPJS, BPBD, Baznas, PMI , Perangkat Daerah terkait hingga desa.

a. Capaian Kinerja Dinas Sosial P2PA Kabupaten Demak

Tingkat capaian kinerja Dinas Sosial P2PA Kabupaten Demak berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja urusan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Secara rinci capaian kinerja disajikan pada tabel berikut:

Top of Form
Bottom of Form

Tabel 2.5.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2021-2026

Urusan Sosial

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator (IKU,IKD)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	%		V	83,79	84,31	84,52	84,68	84,75	84.47	87.28	89.02	NA	NA				-	-
2	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	%		V	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Angka		V	80,32	80,36	80,39	80,43	80,5	77,7	77,7	78.35	78,8						
4	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Perangkat Daerah yang mencapai target	%		V	100	100	100	100	100	n/a	0.26	2.45	1.54	1.67					

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator (IKU,IKD)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
5	Indeks Pembangunan Gender	Angka		V	91,22	91,54	91,67	91,91	92,14	90.9	91.16	91.3	91.17	91.25					
6	Indeks Komposit Kesejahteraan Anak	Angka		V	69,36	69,36	70,32	70,32	70,32	69.36	69.36	69.36	69.36	69.36					
7	Skor Kabupaten Layak Anak	Angka		V	575,01	501-600	501-600	601-700	601-700	66.85	66.83	67.82	68.56	66.22					
8	Persentase korban bencana yang sudah pulih fungsi sosialnya	%		V	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase PPKS yang mandiri	%		V	0,26	0,45	0,73	1,6	1,65	0,26	2,45	1,54	1,67						
10	Persentase Penurunan PPKS	%		V															

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator (IKU,IKD)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
11	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Dengan indikator SPM)	%			100	100	100	100	100	98,3 1	100	100	100	100	98,3 1	100	100	100	100
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator (IKU,IKD)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
3	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%			95,00	95,57	95,67	95,77	95,87	66,27	100	100	100	100	69,76	104,53	104,53	104,42	104,31
4	Persentase PMKS yang tertangani	%			95,11	95,60	97,01	97,51	97,81	100	100	100	100	100	105,14	104,60	103,08	102,55	102,24
5	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%			95,00	95,57	95,67	95,77	95,87	100	100	100	100	100	105,26	104,64	104,53	104,42	104,31

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator (IKU,IKD)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
6	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan social	%			100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%			100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator (IKU,IKD)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
9	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%			100	100	100	100	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%			39,5	40,01	40,05	40,09	40,13	34,02	17,51	27,48	24,11		86,13	43,76	68,61	60,14	

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%			0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	6,39	3,92	8,11	9,34		639	392	811	934	
4	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%			3,80	3,81	3,90	3,93	3,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	%			12	12	12	16	16	6	6	6	6	6	50	50	50	37,5	
6	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%			40,79	40,83	40,87	40,91	40,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
7	Rasio KDRT	%			0,01	0,012	0,015	0,018	0,021	6,37	3,9	8,12	9,35		637	32500	54133,33	51944,44	
8	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	%			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Partisipasi angkatan kerja perempuan	%			40,79	40,81	40,85	40,88	40,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
12	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
13	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
14	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
15	Cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
16	Cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan	%			100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	
17	Rasio APM Perempuan / Laki-Laki di SD	%			76,05	76,05	76,05	76,05	76,05	-	-	-	-		-	-	-	-	

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
18	Rasio APM perempuan /Laki-Laki di SMP	%			83,3	83,3	83,3	83,3	83,3	-	-	-	-		-	-	-	-	
19	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di SMA	%			79,9	79,9	79,9	79,9	79,9	-	-	-	-		-	-	-	-	
20	Rasio APM Perempuan/Laki-laki di Perguruan Tinggi	%			-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	
21	Rasio Melek Huruf Perempuan terhadap Laki-laki pada Kelompok Usia 15-24 Tahun	%			100	100	100	100	100	-	-	-	-		-	-	-	-	

NO	Indikator Kinerja	Satuan	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
22	Kontribusi perempuan dalam pekerjaan upahan di sector non pertanian	%			48,74	48,74	48,74	48,74	48,74	-	-	-	-		-	-	-	-	

Keterangan:

- 1

Nomor
- 2

Indikator kinerja yang ada di renstra sebelumnya (level tujuan, sasaran, program)
- 3

Satuan kinerja
- 4

Jika ada target IKK bisa dimasukkan, jika tidak ada bisa dikosongkan
- 5

Target dari kementrian terkait misalnya
- 6

Target awal atau tahun pertama renstra disusun
- 7

Target tahun kedua renstra disusun
- 8

Target tahun ketiga renstra disusun
- 9

Target tahun keempat renstra disusun
- 10

Target tahun elima renstra disusun
- 11

Realisasi tahun pertama renstra disusun
- 12

Realisasi tahun kedua renstra disusun
- 13

Realisasi tahun ketiga renstra disusun
- 14

Realisasi tahun keempat renstra disusun
- 15

Realisasi tahun kelima renstra disusun
- 16

Rasio tahun pertama renstra disusun
- 17

Rasio tahun kedua renstra disusun
- 18

Rasio tahun ketiga renstra disusun
- 19

Rasio tahun keempat renstra disusun
- 20

Rasio tahun kelima renstra disusun

Rumus rasio adalah: Realisasi Tahun N x 100%

 Target Tahun

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Sosial P2PA Kabupaten Demak

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari tahun pertama hingga tahun terakhir RPJMD dapat dikatakan baik, jika realisasi anggaran belum terserap 100% tetapi sudah tercapai target sasaran kinerja melebihi 100%. Hal tersebut didukung dengan adanya Anggaran APBN dari Pemerintah Pusat kepada Daerah, dapat dilihat pada Tahun 2022 hingga saat ini (2025) Pemerintah Pusat telah memberikan Program BPNT/Sembako kepada masyarakat terutama masyarakat sangat miskin dalam mensejahterakan ekonominya. Sehingga semakin kecil efisiensi anggaran yang disediakan dari anggaran APBD maka efektivitas anggaran semakin tinggi.

Dari hasil analisa diatas, maka faktor – faktor yang mendukung tercapainya sasaran diatas adalah sebagai berikut :

1. Sasaran Meningkatnya PMKS yang tertangani, pada tahun 2022 dari target 34,73% telah tercapai 90,60%.
2. Sasaran Meningkatnya Kelembagaan PUG dan PUHA, pada tahun 2022 dari target 45% telah tercapai 100%.

Program dan Kegiatan Pendukung tercapainya sasaran tahun 2022 berjalan ini adalah Program Pemberdayaan Sosial, Program Rehabilitasi Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana, Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, Program Perlindungan Perempuan, Program Peningkatan Kualitas Keluarga, Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak, Program Pemenuhan Hak Anak (PHA), Program Perlindungan Khusus Anak. Pada Tahun 2025 diadakan efisiensi anggaran yang dipergunakan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional dengan mengalokasikan dana secara lebih tepat sasaran dan mengurangi pemborosan . Penggunaan efisiensi anggaran salah satunya di bidang perlindungan sosial dipergunakan untuk peningkatan anggaran untuk bantuan sosial yang lebih tepat sasaran (seperti PKH, BPNT, BLT). Sehingga anggaran pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang semula Rp. 31.009.717.300,- menjadi Rp. 30.682.747.300,- mengalami penurunan sebesar 1,05 %

Tabel 2.6.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Sosial P2PA
Kabupaten Demak

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (anggaran di renstra)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (pagu yg didapat/ APBD)					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,037,007,761	12,778,732,789	4,621,741,700	6,061,501,940	7,090,313,552	4,611,678,868	1,425,474,887	4,318,359,414	1,060,990,047	-	92	11	93	18	-	7,117,859,548	2,283,300,643
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		8,000,000	8,263,000	16,000,000	20,000,000	-	14,435,150	8,139,500	-	-		180	99	-	-	10,452,600	4,514,930

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (anggaran di renstra)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (pagu yg didapat/ APBD)					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	2,000,000	17.000.000	6,000,000	5,000,000		4,925,000	-	-			722	-	-	-	2,600,000	985,000
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	2,000,000	4.000.000	4,000,000	5,000,000	-	3,901,650	-	-		-	246	-	-	-	2,200,000	780,330
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	2,000,000	7,018,000	3,000,000	5,000,000	-	2,776,000	6,917,000	-		-	139	99	-	-	3,403,600	1,938,600
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	2,000,000	1,245,000	3,000,000	5,000,000	-	2,832,500	1,222,500	-		-	142	-	-	-	2,249,000	811,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,811,890,300	12,007,262,589	4,613,478,700	6,045,501,940	7,070,313,552	3,420,345,151	3,407,076,384	4,310,219,914	1,060,990,047		90	28	93	18	-	6,709,689,416	2,439,726,299
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,229,269,351	9,126,216,589	3,757,927,300	5,151,598,000	6,270,313,552	2,936,812,756	475,790,820	3,502,279,714	859,239,656		91	5	409	17	-	5,507,064,958	1,554,824,589
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	512,621,310	2,881,046,000	855,551,400	893,903,940	800,000,000	483,532,395	475,790,820	807,940,200	201,750,391		94	17	94	23	-	1,188,624,530	393,802,761

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (anggaran di renstra)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (pagu yg didapat/ APBD)					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5,037,007, 761		1,148,518 ,923	2,594,540,2 00		4,611,678,86 8		1,048,602 ,029	54,782,5 00		92	-	91	2	1	1,756,013,37 7	1,143,012, 679
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	3,000,000	2,898,000	3,000,000	3,000,000	-	2,870,000	2,870,000			-	96	99	-	2	2,379,600	1,148,000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	3,000,000	2,898,000	3,000,000	3,000,000	-	2,870,000	2,870,000	-		-	96	99	-	3	2,379,600	1,148,000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	150,000,00 0	23,000,000	191,050,0 00	287,550,00 0	180,000,00 0	149,617,562	174,838,8 00	184,827,0 00	-		100	760	97	-	4	166,320,000	101,856,67 2
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	0	75,750,000	- 0	-	-	-	-		-	-	-	-	5	15,150,000	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	150,000,0 00	23,000,000	191,050,0 00	208,800,00 0	177,000,00 0	149,617,562	171,978,8 00	184,827,0 00	-		100	748	97	-	6	149,970,000	101,284,67 2
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	-	3,000,000	3.000.00 0	3,000,000	3,000,000	-	2,860,000	-	-		-	95	-	-	7	1,800,000	572,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	350,212,7 00	371,004,07 8	301,995,0 00	311,083,50 0	784,000,00 0	349,122,550	359,201,9 88	295,870,2 39	42,421,6 00		100	97	98	14	8	423,659,056	209,323,27 5

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (anggaran di renstra)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (pagu yg didapat/ APBD)					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30,115,000	4,997,810	11,474,400	15,000,000	35,000,000	29,059,450	13,491,001	10,910,000	7,834,000		96	270	95	52	9	19,317,442	12,258,890
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	83,008,700	60,000,000	94,207,500	104,263,500	250,000,000	82,993,600	91,190,100	91,487,900	10,629,600		100	152	97	10	10	118,295,940	55,260,240
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11,219,000	6,998,100	31,642,100	40,000,000	15,000,000	11,213,500	24,908,000	31,142,500	18,958,000		100	356	98	47	11	20,971,840	17,244,400
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	9,050,000	30,000,000	16,000,000	20,000,000	30,000,000	9,050,000	17,085,500	14,537,600	-		100	57	91	-	12	21,010,000	8,134,620
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3,000,000	5,978,168	4,000,000	4,000,000	14,000,000	2,990,000	4,380,000	3,790,000	840,000		100	73	95	21	13	6,195,634	2,400,000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	-	5,000,000	5,605,000	10,000,000	20,000,000	-	10,300,000	5,447,500	-		-	206	97	-	14	8,121,000	3,149,500
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	213,820,000	230,020,000	132,066,000	107,820,000	360,000,000	213,816,000	188,094,987	131,764,389	4,160,000		100	82	100	4	15	208,745,200	107,567,075

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (anggaran di renstra)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (pagu yg didapat/ APBD)					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	-	3,010,000	7,000,000	10,000,000	10,000,000	-	9,752,400	6,790,350	-	-	-	324	97	-	16	6,002,000	3,308,550
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	25,000,000	50.000.000		50,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	15,000,000	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17,627,796,483	530,450,200	98,000,000	828,884,760	794,000,000	399,893,000	381,941,000	93,680,000			2	72	96	-	18	3,975,826,289	175,102,800
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	230,732,000	415,100,000	3392229.000.	390.000,000	390,000,000	228,000,000	403,200,000	-	-		99	97	-	-	19	300,932,400	126,240,000
Pengadaan Mebel	-	49,950,200	10,000,000	162,183,200	50,000,000	-	49,820,000	9,780,000	-		-	100	98	-	20	54,426,680	11,920,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	179,300,000	-	-	106,100,000	154,000,000	171,893,000	136,400,000	-	-		96	-	-	-	21	87,880,000	61,658,600
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	91,771,560	25,000,000	-	181,121,000	-	-		-	-	-	-	22	23,354,312	36,224,200

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (anggaran di renstra)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (pagu yg didapat/ APBD)					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	65,400,000	-	-	175,000,000	-	14,600,000	-	-	-	-	22	-	-	23	48,080,000	2,920,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	102,700,000	506,200,000	197,771,000	228,771,000	254,000,000	87,272,904	130,169,824	137,498,240	-	-	85	26	70	-	24	257,888,400	70,988,194
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,700,000	10,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000	2,500,000	4,000,000	2,000,000	-	-	93	40	100	-	25	4,340,000	1,700,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100,000,000	496,200,000	195,771,000	225,771,000	250,000,000	84,772,904	126,169,824	135,498,240	-	-	85	25	69	-	26	253,548,400	69,288,194
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	221,606,800	968,209,750	356,804,923	935,250,940	321,690,000	205,427,701	376,453,275	333,856,550	12,360,900	-	93	39	94	1	27	560,712,483	185,619,685
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	9,435,000	90,000,000	50,000,000	141,379,940	82,000,000	9,435,000	42,982,983	47,389,500	2,002,900	-	100	48	95	1	28	74,562,988	20,362,077

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (anggaran di renstra)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (pagu yg didapat/ APBD)					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	139,934,000	747,340,000	85,070,223	149,500,000	84,540,000	124,094,501	76,133,639	68,850,300	10,358,000		89	10	81	7	29	241,276,845	55,887,288
Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan perizinan alat besar	-		--	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	30	-	-
Pemeliharaan mebel	-	1,000,000	-	-	5,000,000	-	49,820,000	-	0		-	4,982	-	-	31	1,200,000	9,964,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	15,150,000	13,050,000	19,980,000	10,000,000			9,625,000	13.050.000		-	-	74	-	32	11,636,000	1,925,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	56,637,800	69,999,750	100.000.000	599,391,000	120,000,000	56,298,200	232,781,353				99	333	-	-	33	169,205,710	57,815,911
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	15,600,000	19,230,000	205,440,000	21,500,000	10,150,000	15,600,000	14,595,000	204,929,000	205.440.000		100	76	100	-	34	54,384,000	47,024,800

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (anggaran di renstra)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (pagu yg didapat/ APBD)					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	25,490,000	3,244,700	3,500,000	10,000,000		5,545,300	3,062,750	3.244.700		-	22	94	-	35	8,446,940	1,721,610
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		100,000,000									-	-	-	-	36	20,000,000	-
<i>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</i>		100,000,000									-	-	-	-	37	20,000,000	-
Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota		100,000,000									-	-	-	-	38	20,000,000	-
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	714,539,100	759,075,000	1,154,990,000	834,635,000	709,670,000	699,755,667	750,950,588	1,154,451,500	1,360,000		98	99	100	0	39	834,581,820	521,303,551
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	2,222,503,700	749,240,000	1,154,990,000	834,635,000	679,000,000	699,755,667	741,658,088	1,154,451,500	1,360,000		31	99	100	0	40	1,128,073,740	519,445,051
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	21,225,000	25,000,000	12,000,000	18,320,000	50,000,000	21,203,000	24,373,400	11,925,000	12.000.000		100	97	99	-	41	25,309,000	11,500,280

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (anggaran di renstra)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (pagu yg didapat/ APBD)					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota		241,720 ,000	20,000,00 0	14,065,000	300,000,00	216,364,517	236,895,6 41	19,975,00 0	20.000.0 00	-	98	100	-	4 2		115,157,000	94,647,032
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		478,335 ,000	1,122,990 ,000	802,250,00 0	249,000,00 0	439,818,150	476,234,0 47	1,122,551 ,500	1,360,00 0	-	100	100	0	4 3		530,515,000	407,992,73 9
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	2,201,278, 700	1,587,1 85,500	1,817,257 ,877	1,101,505,0 00	2,317,160,8 00	2,146,177,07 5	1,554,481 ,719	1,738,542 ,492	110,395, 500	97	98	96	10	4 4		1,804,877,57 5	1,109,919, 357
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1,899,678, 700	1,567,1 85,500	1,677,493 ,477	1,068,060,0 00	1,975,560,8 00	1,875,513,17 5	1,536,240 ,719	1,610,084 ,992	109,285, 500	99	98	96	10	4 5		1,637,595,69 5	1,026,224, 877
Penyediaan Permakanan	670,229,0 00	636,116 ,370	515,800,6 45	435,300,00 0	800,000,00	668,094,385	632,731,8 50	490,599,2 30	71,179,5 00	100	99	95	16	4 6		611,489,203	372,520,99 3

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (anggaran di renstra)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (pagu yg didapat/ APBD)					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Sandang	219,500,000	12,812,000	12,000,000	30,000,000	25,732,100	217,845,280	11,349,500	11,213,500	12.000.000		99	89	93	-	47	60,008,820	48,081,656
Penyediaan Alat Bantu	209,215,700	136,534,000	120,000,000	87,500,000	143,635,700	196,850,000	136,500,000	119,987,900	120.000.000		94	100	100	-	48	139,377,080	90,667,580
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	60,745,000	35,505,000	34,000,000	10,905,000	60,745,000	58,305,000	27,318,000	33,239,500	2,090,000		96	77	98	19	49	40,380,000	24,190,500
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	401,000,000	359,333,430	380,166,560	350,000,000	490,165,000	400,148,010	352,850,500	362,595,000	19,831,000		100	98	95	6	50	396,132,998	227,084,902
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	107,000,000	100,800,700	145,054,272	100,000,000	200,000,000	107,000,000	99,519,369	129,509,000	145.054.272		100	99	89	-	51	130,570,994	67,205,674
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	28,800,000	23,500,000	5,000,000	750,000	-	28,760,000	23,385,000	4,950,000	475,000		100	100	99	63	52	11,610,000	11,514,000

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (anggaran di renstra)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (pagu yg didapat/ APBD)					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	27,000,000	19,010,000	27,580,000	9,990,000	45,000,000	27,000,000	18,602,000	27,580,000	3,704,000		100	98	100	37	53	25,716,000	15,377,200
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	17,950,000	101,050,000	15,050,000	1,025,000	18,100,000	17,948,000	95,979,500	14,900,000	15.050.000		100	95	99	-	54	30,635,000	25,765,500
Pemberian Layanan Kedaruratan	43,599,000	89,180,000	69,790,000	29,120,000	115,599,000	43,527,000	89,015,000	69,100,862	6,796,000		100	100	99	23	55	69,457,600	41,687,772
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	54,150,000	30,900,000	20,070,000	5,240,000	54,150,000	53,673,000	27,940,000	15,660,000	1,680,000		99	90	78	32	56	32,902,000	19,790,600
Pemberian Layanan Rujukan	60,420,000	22,444,000	332,982,000	8,230,000	22,434,000	56,362,500	21,050,000	330,750,000	3,530,000		93	94	99	43	57	89,302,000	82,338,500
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	301,600,000	20,000,000	139,764,400	33,445,000	341,600,000	270,663,900	18,241,000	128,457,500	1,110,000		90	91	92	3	58	167,281,880	83,694,480

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (anggaran di renstra)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (pagu yg didapat/ APBD)					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	5,705,000	-	-	-	-	4,200,000	-	-	-		74	-	-	-	59	1,141,000	840,000
Pemberian Layanan Kedaruratan	16,420,000	5,000,000	5,250,000	890,000	16,420,000	10,795,000	3,750,000	2,775,000	5.250.000		66	75	53	-	60	8,796,000	3,464,000
Penyediaan Permakanan	32,725,000	5,000,000	8,000,000	3,000,000	32,725,000	25,659,000	4,646,000	7,050,000	8.000.000		78	93	88	-	61	16,290,000	7,471,000
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	188,000,000	359,333,430	75,000,000	20,000,000	118,000,000	180,369,900		72,741,000	1,110,000		96	-	97	6	62	152,066,686	50,844,180
Penyediaan Alat Bantu	25,300,000	0	0	0	25,300,000	17,710,000	0	0	0		70	-	-	-	63	10,120,000	3,542,000
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	188,000,000	0	0	0	6,735,000	6,735,000	0	0	0		4	-	-	-	64	38,947,000	1,347,000

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (anggaran di renstra)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (pagu yg didapat/ APBD)					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	4,930,000	5,000,000	0	0	4,930,000	3,430,000	4,945,000	0	0		70	-	-	-	65	2,972,000	1,675,000
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan kabupaten/kota	20.000.000	20,000,000	21,814,400	3,000,000	45,000,000	18.500.000	18.000.000	20,110,000	21.814.400		-	-	92	-	66	17,962,880	4,022,000
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	4,745,000	19,010,000	24,800,000	5,190,000	4,745,000	4,725,000	18,602,000	22,125,000	24.800.000		100	98	89	-	67	11,698,000	9,090,400
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	13,200,000	0	0	0	25,000,000	13,200,000	0	0	0		100	-	-	-	68	7,640,000	2,640,000
Pemberian Layanan Rujukan	3,840,000	22,444,000	4,900,000	1,365,000	23,840,000	3,840,000	21,050,000	3,656,500	4.900.000		100	94	75	-	69	11,277,800	5,709,300

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (anggaran di renstra)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (pagu yg didapat/ APBD)					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan Rehabsos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	7 0	-	-	-
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	13,760,08 3,317	20,124, 479,900	16,477,87 7,318	17,872,056, 300	7,062,970,0 00	13,710,872,8 15	20,060,45 1,445	16,083,62 7,000	8,926,00 0	100	100	98	0	7 1	15,059,493,3 67	9,972,775, 452	
Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar		87,020, 000	199,999,7 00	97,350,000	110,000,00 0		87,020,00 0	176,725,0 00	3,500,00 0	-	100	88	4	7 2	98,873,940	53,449,000	
Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	0	87,020,00 0	199,999,7 00	97,350,000	110,000,00 0	0	87,020,00 0	176,725,0 00	3,500,00 0	-	100	88	4	7 3	98,873,940	53,449,000	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	13,760,08 3,317	1,407,8 63,000	16,277,87 7,618	17,774,7 06,300	6,952,970,0 00	13,710,872,8 15	19,973,43 1,445	15,906,90 2,000	5,426,00 0	100	1,419	98	0	7 4	11,234,700,0 47	9,919,326, 452	
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	496,019,2 00	1,308,7 20,000	62,330,00 0	60,000,000	1,450,000,0 00	495,849,200	1,303,347 ,625	61,674,00 0	525,000	100	100	99	1	7 5	675,413,840	372,279,16 5	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	0	20,037, 459,900	310,000,0 00	78,940,000	1,000,000,0 00	1,154,757,49 1	1,399,118 ,500	309,692,0 00 ;	309.692, 000	-	7	100	-	7 6	4,285,279,98 0	572,713,59 8	

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (anggaran di renstra)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (pagu yg didapat/ APBD)					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	0	17,320,876,900	15,905,547,618	16,860,291,300	4,502,970,000	12,060,266,124	17,270,965,320	15,535,536,000	3,101,000		-	100	98	0	77	10,917,937,164	8,973,973,689
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	0	0	0	0		0	0	0	1,800,000		-	-	-	0	78	155,095,000	360,000
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	3,344,272,000	1,905,011,980	571,808,978	1,362,820,000	1,950,600,000	3,118,302,925	1,874,729,000	532,832,500	75,366,000		93	98	93	6	79	1,826,902,592	1,120,246,085
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	3,144,196,000	1,734,171,000	521,775,978	1,325,725,000	1,550,000,000	2,918,373,925	1,704,631,000	483,355,500	61,366,000		93	98	93	5	80	1,655,173,596	1,033,545,285
Penyediaan Makanan	2,944,120,000	249,951,000	225,000,868	225,000,000	250,000,000	169,383,800	220,706,000	220,628,000	59,466,000		6	88	98	26	81	778,814,374	134,036,760
Penyediaan Sandang	100,000,000		24,900,000	34,000,000	100,000,000	99,567,000		22,770,000	22.770.000		100	-	91	-	82	51,780,000	24,467,400
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	435,270,000	27,700,000	4,885,110	10,000,000	450,000,000	429,500,000	27,700,000	4,387,500	4.387.500		99	100	90	-	83	185,571,022	92,317,500

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (anggaran di renstra)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (pagu yg didapat/ APBD)					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
Pelayanan Dukungan Psikososial	2,208,850,000	1,456,520,000	266,990,000	1,056,725,000	750,000,000	2,219,923,125	1,456,225,000	235,570,000	1,900,000		101	100	88	0	84	1,147,817,000	782,723,625
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	200,076,000	170,840,980	50,033,000	37,095,000	400,600,000	199,929,000	170,098,000	49,477,000	14,000,000		100	100	99	38	85	171,728,996	86,700,800
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	200,076,000	170,840,980	50,033,000	37,095,000	400,600,000	199,929,000	170,098,000	49,477,000	14,000,000		100	100	99	38	86	171,728,996	86,700,800
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	25,735,000	30,735,050	22,195,200	22,003,860	115,270,341	25,735,000	27,631,250	21,845,800	1,537,401		100	90	98	7	87	43,187,890	15,349,890
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	25,735,000	30,735,050	22,195,200	22,003,860	115,270,341	25,735,000	27,631,250	21,845,800	1,537,401		100	90	98	7	88	43,187,890	15,349,890
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	25,735,000	30,735,050	22,195,200	22,003,860		25,735,000	27,631,250	21,845,800	1,537,401		100	90	98	7	89	20,133,822	15,349,890
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK											-	-	-	-	90	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (anggaran di renstra)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (pagu yg didapat/ APBD)					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	42,250,00 0	70,000, 000	100,000,0 00	101,475,00 0	1,090,000,0 00	42,250,000	61,439,65 0	97,419,20 0			100	88	97	-	9 1	280,745,000	40,221,770
Advokasi kebijakan dan pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	0	0	157.250.0 00	120.000.00 0	192.000.00 0		23,964,00 0	97,419,20 0	97.419.2 00		-	-	97	-	9 2	20,000,000	24,276,640
Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	15,000,00 0	55,000, 000		68,325,000	650,000,00 0	15,000,000	47,095,25 0		0		100	86	-	-	9 3	157,665,000	12,419,050
Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan pelaksanaan PUG	0	0	20.000.0 00	22,025,000	90,000,000	50. 613.900	0		0		-	-	-	-	9 4	22,405,000	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota		25,000, 000	65.000.0 00	23,150,0 00	170,000,00 0		23,131,25 0		0		-	93	-	-	9 5	43,630,000	4,626,250

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (anggaran di renstra)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (pagu yg didapat/ APBD)					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG	15,000,000		175.000.000			15,000,000	15.000.000		0		100	-	-	-	96	3,000,000	3,000,000
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	0		0	23,150,000			0		0		-	-	-	-	97	4,630,000	-
Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	27,250,000	15,000,000	100,000,000	33,150,000	440,000,000	27,250,000	14,344,400	97,419,200	0		100	96	97	-	98	123,080,000	27,802,720
Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi	27,250,000	15,000,000	165.000.000	33,150,000	220,000,000	27,250,000	14,344,400		0		100	96	-	-	99	59,080,000	8,318,880
PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	102,275,500	260,000,000	65,000,000	76,580,000	1,322,396,000	72,929,125	255,117,500	56,609,200	5,262,000		71	98	87	7	100	365,250,300	77,983,565

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (anggaran di renstra)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (pagu yg didapat/ APBD)					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	0	20,000,000	25,000,000	20,530,000	380,650,000		18,970,000	22,857,200	22.857.200		#DIV/0!	95	91	-	101	89,236,000	8,365,440
Advokasi kebijakan dan pendampingan layanan perlindungan perempuan kewenangan kabupaten/kota	0		25,000,000	20,530,000	45,000,000	0	0	22,857,200	22.857.200		-	-	91	-	102	18,106,000	4,571,440
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota		40,000,000	30,000,000	42,000,000	656,746,000		37,147,500	23,912,500	5,262,000		-	93	80	13	103	153,749,200	13,264,400
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	46,775,500		30,000,000	42,000,000		18,084,300	18.840.300	23,912,500	5,262,000		39	-	80	13	104	23,755,100	9,451,760

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (anggaran di renstra)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (pagu yg didapat/ APBD)					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	55,500,000	200,000,000	10,000,000	14,050,000	285,000,000	54,844,825	199,000,000	9,839,500	9.839.500		99	100	98	-	105	112,910,000	52,736,865
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota			10,000,000	14,050,000	20,000,000		0	9,839,500	9.839.500		-	-	98	-	106	8,810,000	1,967,900
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	555,000,000	535,000,000	543,022,364	441,570,000	960,000,000	552,698,676	528,122,271	526,298,350	5,150,000		100	99	97	1	107	606,918,473	322,453,859
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesenjangan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	555,000,000	535,000,000	543,022,364	441,570,000	960,000,000	552,698,676	528,122,271	526,298,350	5,150,000		100	99	97	1	108	606,918,473	322,453,859

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (anggaran di renstra)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (pagu yg didapat/ APBD)					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	555,000,000	525,000,000	543,022,364	441,570,000	690,000,000	552,698,776	518,879,871	526,298,350	5,150,000		100	99	97	1	09	550,918,473	320,605,399
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK		40,000,000	10,000,000	8,585,000	776,694,430	15,000,000	34,677,000	8,665,000	17.330.000		-	87	87	-	0	167,055,886	11,668,400
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15,000,000	40,000,000	10,000,000	8,585,000	776,694,430	15,000,000	34,677,000	8,665,000	8.665.000		100	87	87	-	111	170,055,886	11,668,400
Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota		20,000,000	10,000,000	8,585,000	387,694,430		17,740,000	8,665,000	8.665.000		-	89	87	-	112	85,255,886	5,281,000
PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	200,000,000	149,060,000	199,836,000	184,240,000	1,195,951,269	198,913,900	147,319,874	197,410,450	3,805,000		99	99	99	2	13	385,817,454	109,489,845

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (anggaran di renstra)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (pagu yg didapat/ APBD)					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	160,000,000	109,060,000	184,836,000	169,240,000	781,951,269	159,234,000	107,891,874	182,772,800	3,805,000		100	99	99	2	4	281,017,454	90,740,735
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	140,000,000	60,000,000	184,836,000	169,240,000	392,951,269	139,240,000	59,317,374	182,772,800	3,805,000		99	99	99	2	5	189,405,454	77,027,035
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	40,000,000	40,000,000	15,000,000	15,000,000	414,000,000	39,679,900	39,428,000	14,637,650	0		99	99	98	-	6	104,800,000	18,749,110
koordinasi sinkronisasi penyediaan sarana prasarana layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	34,500,000	40,000.000	15.000.000	15,000,000	414.000.000	34,400,000	39.428.000	14.637,650	0		100	-	-	-	7	6,900,000	6,880,000

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (anggaran di renstra)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (pagu yg didapat/ APBD)					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
Penyediaan Layanan bagi Anak yang memerlukan Perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah Kabupaten/Kota	103,480,419	40.000,000	15.000.000	15.000.000	305,044,000	57,910,260	39.4228.000	15.000.000	14.637.650		56	-	-	-	118	81,704,884	11,582,052
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40,000,000	40,000,000	15,000,000	15,000,000	379,000,000	39,679,900	39,428,000	15,000,000	14.637.650		99	99	100	-	119	97,800,000	18,821,580
PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	137,980,419	36,703,000	59,999,728		945,500,578	92,310,260	23,924,200	59,999,728	1,260,000		67	65	100	-	120	236,036,745	35,498,838
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	103.480.419	16,703,000	59,999,728	54,795,000	316,557,441	57.910.260	9,469,200	59,999,728	55.725.100		#DIV/0!	57	100	2	121	89,611,034	14,145,786

Uraian	Anggaran pada Tahun ke- (anggaran di renstra)					Realisasi Anggaran pada Tahun ke- (pagu yg didapat/ APBD)					Rasio antara Realisasi dengan Anggaran pada Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	Anggaran	Realisasi
Koordinasi dan Sinkronisasi pelaksanaan pendampingan Anak yang memerlukan Perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	103,480,419	16.703.000	175.085.000	165.063.000	305,044,000	57,910,260	9.469.200	14.455.000	55.725.100		56	-	-	-	122	81,704,884	11,582,052
Advokasi kebijakan dan pendampingan perangkat daerah dalam pelaksanaan kebijakan/ program/ kegiatan pencegahan KTA	85,661,948,196	0	59,999,728	54,795,000		0	0	59,999,728	1,260,000		-	-	100	2	123	17,155,348,585	12,251,946
											-	-	-	-	124	-	-

Keterangan:

- 1

Nama program/ kegiatan periode renstra sebelumnya
- 2

Anggaran awal atau tahun pertama renstra disusun
- 3

Anggaran tahun kedua renstra disusun
- 4

Anggaran tahun ketiga renstra disusun
- 5

Anggaran tahun keempat renstra disusun
- 6

Anggaran tahun elima renstra disusun
- 7

Realisasi anggaran tahun pertama renstra disusun
- 8

Realisasi anggaran tahun kedua renstra disusun
- 12

Rasio realisasi dan anggaran tahun pertama renstra disusun
- 13

Rasio realisasi dan anggaran tahun kedua renstra disusun
- 14

Rasio realisasi dan anggaran tahun ketiga renstra disusun
- 15

Rasio realisasi dan anggaran tahun keempat renstra disusun
- 16

Rasio realisasi dan anggaran tahun kelima renstra disusun
- 17

Rata-rata pertumbuhan anggaran dari tabel keternagan 2-6
- 18

Rata-rata pertumbuhan realisasi dari tabel keternagan 7 -11

- 9 Realisasi anggaran tahun ketiga renstra disusun
- 10 Realisasi anggaran tahun keempat renstra disusun
- 11 Realisasi anggaran tahun kelima renstra disusun

Rumus rasio adalah: $\frac{\text{Realisasi Tahun N}}{\text{Target Tahun N}} \times 100\%$

Rumus pertumbuhan: $\frac{\text{Anggaran/Realisasi Tahun N} - \text{Anggaran/Realisasi Tahun N-1}}{\text{Anggaran/Realisasi Tahun N-1}}$

c. Kelompok sasaran pelayanan Dinsos P2PA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinsos P2PA Kabupaten Demak menetapkan sejumlah kelompok sasaran utama yang menjadi prioritas pelayanan. Kelompok sasaran ini merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki tingkat ketentuan social dan ekonomi tinggi serta memerlukan perlindungan dan pemberdayaan secara khusus dari pemerintah daerah. Adapun kelompok yang menjadi sasaran pelayanan Dinsos P2PA adalah :

1. Kelompok Keluarga Pra- sejahtera dan miskin .

Kelompok ini merupakan penerima utama program bantuan social seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), serta bantuan darurat saat terjadi bencana. Kelompok ini masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan menjadi prioritas dalam penyaluran bantuan pemerintah.

2. Kelompok anak terlantar, anak korban kekerasan dan eksploitasi, anak yang berhadapan dengan hukum, serta anak dari keluarga miskin dan rentan. Anak-anak dengan kebutuhan khusus juga menjadi perhatian, mengingat pentingnya perlindungan dan pengembangan potensi anak dalam masa tumbuh kembang mereka.

3. Kelompok perempuan, terutama yang berada dalam situasi rentan, juga menjadi kelompok sasaran utama. Termasuk dalam kelompok ini adalah perempuan kepala keluarga (PEKKA), perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan seksual, serta perempuan yang terdampak bencana dan kemiskinan. Perempuan penyandang disabilitas juga mendapatkan perhatian dalam rangka pemenuhan hak – hak dasar perlindungan social mereka.

4. Kelompok Penyandang disabilitas , baik fisik, mental, intelektual, maupun sensorik, yang membutuhkan akses terhadap layanan social yang inklusif dan ramah disabilitas. Pemerintah Daerah memberikan intervensi khusus kepada penyandang disabilitas yang berasal dari keluarga tidak mampu agar mereka tidak semakin termarginalkan.

5. Kelompok lansia atau lanjut usia, khususnya lansia terlantar dan miskin menjadi sasaran pelayanan dalam bentuk bantuan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, serta pelayanan perawatn. Lansia tanpa keluarga atau yang hidup sendiri juga menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas hidup mereka diusia senja.

6. Kelompok korban kekerasan dan perdagangan orang, termasuk korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual serta korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Kelompok ini membutuhkan penanganan yang komprehensif, mulai dari pendampingan psikologis, bantuan hukum hingga reintegrasi sosial.

7. Kelompok pekerja sosial, relawan dan lembaga kesejahteraan sosial (LKS) sebagai mitra kerja juga menjadi sasaran dalam bentuk pelatihan, fasilitasi, dan pembinaan kapasitas. Peran mereka sangat strategis dalam memperluas jangkauan pelayanan sosial di masyarakat.
8. Kelompok masyarakat yg terdampak permasalahan sosial, bencana alam dan bencana sosial .

d. Mitra Dinas Sosial P2PA dalam Pemberian Pelayanan

Dinas Sosial, P2PA Kabupaten Demak merupakan instansi pemerintah daerah yang memiliki peran penting dalam urusan sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya , bekerja sama dengan mitra strategis baik dari unsur pemerintah, swasta maupun masyarakat sipil.

1. Mitra Pemerintah

Dinas Sosial P2PA bersinergi dengan lembaga – lembaga pemerintah lain untuk memastikan koordinasi program berjalan lancar, diantaranya yaitu :

- a. Dinas Pendidikan : untuk peningkatan akses pendidikan bagi anak – anak dan pemberdayaan perempuan melalui pendidikan non formal.
- b. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil : terutama dalam pencatatan identitas anak dan perempuan korban kekerasan dan penerbitan dokumen darurat (akta lahir, KTP, KK) bagi korban bencana.
- c. Kepolisian dan Kejaksaan : sebagai mitra dalam penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan atau tindak pidana terhadap perempuan dan anak.
- d. Baperida : dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan berbasis gender dan perlindungan anak.
- e. Dinas Kesehatan : dalam program kesehatan ibu dan anak, serta penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- f. BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) sebagai mitra bersinergi dalam menangani aspek social kemanusiaan saat dan pascabencana .
- g. BPBD sebagai mitra untuk koordinasi logistic korban bencana alam .
- h. Dinkes sebagai mitra untuk penanganan gizi buruk , pemeriksaan kesehatan , ibu hamil dan layanan trauma healing.
- i. Dinputaru sebagai mitra untuk pembuatan fasilitas umum seperti MCK terpisah dan ruang laktasi darurat di lokasi pengungsian.
- j. Satpol PP sebagai mitra pengamanan pengungsian dan pendampingan evakuasi kelompok rentan.

2. Mitra Lembaga Non – Pemerintah dan LSM

Dinas Sosial, P2PA juga bekerja sama dengan LSM local dan nasional seperti LBH Apik, Yayasan Setara Semarang , PMI, LKS/LKSA atau organisasi masyarakat sipil lain yang aktif dalam isu perempuan dan anak. Organisasi keagamaan dan komunitas lokal yang mendukung upaya penyuluhan, advokasi dan pendampingan korban.

3. Mitra Dunia Usaha dan CSR

Dinas Sosial, P2PA juga bekerja sama dengan dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) dalam mendukung kegiatan pemberdayaan ekonomi perempuan , pelatihan keterampilan dan bantuan sosial., Kolaborasi dengan UMKM dan koperasi perempuan.

4. Forum dan Jejaring Masyarakat

- Forum Anak Demak (FADEM) sebagai wadah partisipasi anak
- Forum PUSPA (Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak) sebagai jejaring masyarakat.
- Relawan Sosial dan Tagana (Taruna Siaga Bencana) sebagai bagian dari kesiapsiagaan dan respon bencana sosial.

o

Dengan melibatkan berbagai mitra, Dinas Sosial, P2PA Kabupaten Demak mampu melaksanakan tugas – tugasnya secara lebih efektif dan menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Pendekatan kolaboratif ini memperkuat perlindungan sosial serta pemberdayaan yang inklusif, responsive gender dan berbasis hak anak.

Bottom of Form

e. Dukungan BUMD dalam Pencapaian kinerja Dinsos P2PA

Badan Usaha Milik Daerah di lingkungan Kabupaten Demak secara konsisten menjalin kemitraan dengan Dinsos P2PA melalui berbagai bentuk kolaborasi diantaranya :

1. Pendanaan dan sponsor Program sosial

BUMD memberikan kontribusi dalam bentuk pendanaan untuk kegiatan sosial seperti bantuan sembako, santunan anak yatim dan program pemberdayaan ekonomi perempuan. Hal ini membantu memperluas jangkauan program Dinsos P2PA hingga ke lapisan masyarakat rentan ,

seperti Bank Djawa Tengah, BKK, LKM Sejahtera, DSS (Demak Sarana Sehat) , APSAI

2. Pemberdayaan perempuan dan UMKM

Melalui kerja sama dengan Dinas Sosial P2PA, BUMD turut mendukung pelatihan keterampilan dan bantuan permodalan untuk perempuan kepala keluarga dan korban kekerasan guna meningkatkan kemandirian ekonomi mereka (seperti Bank Djawa Tengah, BKK, LKM Sejahtera, DSS (Demak Sarana Sehat) , APSAI .

Dampak dari sinergi ini terlihat dalam meningkatkan capaian kinerja Dinas Sosial, P2PA , antara lain penurunan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak, peningkatan jumlah perempuan pelaku usaha produkti, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam program perlindungan sosial.

f. Kerja sama Daerah yang menjadi tanggung jawab Dinas Sosial P2PA

Sebagai perangkat daerah yang menangani urusan bidang sosial dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak , Dinas Sosial P2PA Kabupaten Demak memiliki tanggung jawab dalam membangun dan mengembangkan kerja sama antar daerah guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan sosial yang inklusif dan berkeadilan. Dnas Sosial P2PA telah melaksanakan berbagai bentuk kerja sama daerah sebagai upaya peningkatan kualitas layanan, efisiensi penanganan kasus, serta perluasan cakupan sasaran intervensi sosial lintas wilayah, adapun bentuk – bentuk kerja sama tersebut antara lain :

1. Penanganan masalah sosial lintas wilayah.

Dinas Sosial P2PA bekerja sama dengan Dinas Sosial dari Kabupaten / Kota tetatangg seperti Kabupaten Kudus, Jepara, Grobogan dan Kota Semarang dalam menangani permasalahan sosial yang melibatkan warga luar daerah. Fokus kerja sama ini meliputi pemulangan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) , penangana anak terlantar, ODGJ, serta koordinasi bantuan dan rehabilitasi sosial.

2. Kerja sama perlindungan perempuan dan anak.

Dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang melibatkan warga lintas daerah, Dinsos P2PA menjalin kerja sama dengan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) serta P2TP2A dari berbagai Kabupaten / Kota. Kegiatan ini mencakup koordinasi layanan, rujukan korban dan penyediaan rumah aman bagi korban kekerasan.

3. Kolaborasi Program penanggulanagn kemiskinan

Dinas Sosial P2PA turut berpartisipasi aktif dalam forum Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskikan Daerah (TKPKD) Provinsi

Jawa Tengah dan wilayah regional. Tujuan dari kerja sama ini adalah menyinergikan program – program intervensi penanggulangan kemiskinan yang bersifat lintas wilayah administratif.

4. Pertukaran dan Integrasi Data Sosial

Untuk memastikan ketepatan sasaran dalam pemberian bantuan sosial, DINSOS P2PA menjalin kerja sama dalam hal pertukaran dan sinkronisasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan pemerintah daerah lain. Hal ini dilakukan khususnya dalam menangani warga rentan yang berdomisili atau berpindah antar wilayah.

5. Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme SDM Sosial

Kerja sama daerah juga mencakup pelaksanaan pelatihan, workshop dan bimbingan teknis secara lintas kabupaten / kota dalam rangka peningkatan kompetensi aparatur dan kelembagaan sosial, termasuk penguatan layanan perlindungan perempuan dan anak, pemberdayaan perempuan serta manajemen penanganan kasus.

Melalui berbagai bentuk kerja sama daerah ini, Dinas Sosial P2PA Kabupaten Demak berupaya menciptakan sinergi yang kuat antarwilayah guna memperkuat system perlindungan sosial yang adaptif dan responsive terhadap dinamika permasalahan sosial masyarakat. Kerja sama ini juga diharapkan menajdi salah satu pilar penting dalam pencapaian target pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan gender dan ramah anak.

g. Inovasi Perangkat Daerah

Inovasi yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial P2PA, Kabupaten Demak merupakan refleksi dari upaya berkelanjutan dalam memberikan pelayanan sosial yang lebih tepat guna, merata dan berorientasi pada keadilan sosial. Inovasi yang tidak lagi aktif bukan berarti gagal, melainkan telah mengalami integrasi , efisiensi atau adaptasi ke dalam model layanan yang lebih baik sesuai kebutuhan terkini.

2.1.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Sosial, P2PA Kabupaten Demak dalam 5 (lima) tahun ke depan untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai salah satu instansi pemerintah daerah antara lain:

a. Tantangan

Tantangan merupakan faktor eksternal yang dapat menghambat kinerja Perangkat Daerah apabila tidak diantisipasi dengan baik. Berdasarkan kinerja pelayanannya, teridentifikasi tantangan yang dihadapi Dinas Sosial P2pa sebagai berikut:

1. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan urusan sosial adalah sebagai berikut :
 - 1.1. Tingginya jumlah kelompok rentan yang memiliki resiko masuk ke dalam kemiskinan ;
 - 1.2. Akurasi dan kelengkapan data pada program – program bantuan sosial belum dapat terintegrasi secara optimal;
 - 1.3. Kurangnya keterkaitan PPKS dengan kelompok miskin dan rentan yang harusnya mendapatkan penangan yang komprehensif ;
 - 1.4. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi SDM yang berkualitas dan dapat berfungsi secara sosial ;
 - 1.5. Masih adanya penduduk miskin dan rentan dalam DTKS yang belum padan NIK nya sehingga perlu dilakukan pemutakhiran ;
 - 1.6. Kurangnya akses pelayanan kesehatan dan pelayanan pendidikan untuk kelompok rentan dan miskin;
 - 1.7. Kurangnya standarisasi SDM khususnya pendampingan sosial dan relawan sosial ;
 - 1.8. Adanya masyarakat yg seharusnya membutuhkan bantuan tetapi tidak masuk atau tidak memperoleh bantuan sosial .
 - 1.9. Adanya masyarakat yg seharusnya tidak membutuhkan bantuan tetapi masuk atau memperoleh bantuan sosial

2. Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut :
 - 2.1. Kurangnya akses ekonomi bagi perempuan ;
 - 2.2. Kurangnya minat dan dukungan masyarakat untuk dipilih dan memilih calon legislatif perempuan ;
 - 2.3. Belum optimalnya kinerja dan jejaring lembaga masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan ;
 - 2.4. Pemahaman dan komitmen para pengambil kebijakan mengenai pentingnya pengintegrasian perspektif gender di semua bidang dan tahapan pembangunan masih kurang.
 - 2.5. Kelompok kerja PUG di Kabupaten belum optimal ;
 - 2.6. Kurangnya perencanaan dan penganggaran yang responsive gender ;
 - 2.7. Rendahnya partisipasi anak dalam pembangunan terutama pada keterlibatan anak dalam proses – proses pengambilan keputusan ;
 - 2.8. Tingginya jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terutama pada kasus KDRT dan kekerasan seksual ;

- 2.9. Pengungkapan kasus- kasus kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) terhambat faktor psikologi keluarga sehingga sulit untuk mengungkap kejahatan yang terjadi dalam keluarga ;
- 2.10 Tingginya angka pernikahan dini di kabupaten Demak .

b. Peluang

Peluang merupakan segala kemungkinan yang muncul dari luar yang apabila dimanfaatkan dengan baik akan mendorong kinerja Perangkat Daerah. Peluang bagi Dinas Sosial P2PA dalam rangka pengembangan pelayanan adalah:

1. Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan urusan sosial adalah sebagai berikut :
 - 1.1. Meningkatkan kualitas Data sasaran dengan melaksanakan kegiatan verifikasi dan validasi secara berkala;
 - 1.2. Mengembangkan Data sasaran meliputi data PPKS, data penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, Data PSKS termasuk didalamnya data Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Panti, dan balai kesejahteraan sosial;
 - 1.3. Sinergitas dan Koordinasi kelembagaan antar OPD harus dilakukan secara efektif dan efisien terkait penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
 - 1.4. Dilaksanakannya monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
 - 1.5. Pendampingan sosial oleh pekerja sosial melalui kegiatan pencegahan, respon kasus, management kasus serta monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara optimal;
 - 1.6. Dukungan teknis melalui penyusunan regulasi, sosialisasi, rapat koordinasi, dukungan kemampuan atau peningkatan aktivitas;
 - 1.7. Dukungan aksesibilitas melalui dukungan langsung dan dukungan tidak langsung didukung oleh kelembagaan unit pelaksana teknis daerah (uptd) berupa panti – panti sosial untuk melaksanakan tugas rehabilitasi sosial bagi PPKS;
 - 1.8. Adanya kelembagaan layanan dan rujukan terpadu berbasis keluarga dan masyarakat di tingkat desa/kelurahan;
 - 1.9. Pelaksanaan kebijakan untuk membentuk sumber daya manusia (SDM) yang adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter;
2. Peluang yang dimiliki dalam pengembangan pelayanan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut :

- 2.1. Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan;
- 2.2. Tersedianya pedoman pelaksanaan perencanaan dan penganggaran Responsif Gender;
- 2.3. Kebijakan kesetaraan gender dan keadilan gender telah tertuang dalam RPJMD, memberikan peluang untuk meningkatkan kesetaraan gender di daerah;
- 2.4. Tersedianya kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak melalui KLA;
- 2.5. Adanya dukungan kebijakan dalam pengembangan kabupaten/kota layak anak memberikan peluang dalam peningkatan kualitas pemenuhan hak anak;
- 2.6. Adanya dukungan dari berbagai lembaga kemasyarakatan dalam pelaksanaan pengarusutamaan gender. Pemberdayaan perempuan, perlindungan perempuan dan anak;
- 2.7. Adanya komitmen dan kerjasama antara lembaga dalam pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak serta TPPO;
- 2.8. Banyaknya potensi kelembagaan yang memiliki kepedulian terhadap kasus – kasus perempuan dan anak yang dapat dioptimalkan perannya dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak;
- 2.9. Banyaknya potensi organisasi kemasyarakatan , Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan dunia usaha yang dapat dioptimalkan untuk mendukung pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

2. 2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Sosial P2PA

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu strategis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Dalam perumusan permasalahan isu strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diantaranya dengan identifikasi permasalahan berdasarkan kondisi riil Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telaahan tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, sampai dengan tujuan akhir adalah melakukan

penentuan isu-isu strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak.

2.2.1. **Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi**

Sebagaimana dalam peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 69 tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu: **”Keterpaduan penanganan PMKS/PPKS dalam penanggulangan kemiskinan kemiskinan”** yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Permasalahan dirumuskan dari data-data pada subbab sebelumnya, Rancangan Awal RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD, dan laporan KLHS RPJMD yang berkaitan dengan pelayanan PD, ataupun hasil penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh PD. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi (realita) yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Permasalahan disajikan secara ringkas tanpa menyajikan data yang berlebih dan berpotensi duplikasi dengan data di subbab sebelumnya. Permasalahan dapat disintesis melalui metode penyusunan pohon masalah.

Permasalahan utama pembangunan jangka menengah Dinas Sosial P2PA yaitu: “Tingginya Tingkat Kemiskinan Kabupaten Demak ”, yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Rumusan Permasalahan
“Keterpaduan penanganan PMKS/PPKS dalam penanggulangan kemiskinan”
“Peningkatkan Kesenjangan dan Keadilan Gender serta Pemenuhan Hak Anak”

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
1	Urusan Sosial Pelayanan rehabilitasi sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih kurang	1. Keterbatasan sarana dan prasarana layanan rehabilitasi sosial 2.Kurangnya tenaga professional sosial 3. Minimya anggaran khusus untuk rehabilitasi sosial 4. Belum optimalnya kolaborasi lintas sector dan lintas daerah . Kurangnya pemahaman dan partisipasi masyarakat

No	Permasalahan	Akar Permasalahan
2	Belum menyeluruhnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial PMKS/PPKS	1. Masih terdapat PMKS/PPKS yg belum terdata atau belum masuk dalam DTKS maupun Siks DJ
		2. Keterbatasan Jaminan sosial bagi kelompok kusus/rentan
		3. Keterbatasan anggaran dan prioritas program
		4. Kurang optimalnya koordinasi lintas sektor
		5. Rendahnya literasi sosial masyarakat
	Urusan P2PA	
1	Belum optimalnya peran, partisipasi dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan	1. Kurangnya partisipasi aktif perempuan di ranah public, termasuk dalam kegiatan ekonomi, politik dan sosial kemasyarakatan.
		2. Kurangnya representasi perempuan di lembaga pengambil keputusan
		3. Minimnya dukungan kebijakan dan Anggaran Responsif Gender (ARG)
		4. Rendahnya kemandirian ekonomi perempuan.
2	Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	1. Masih kuatnya budaya patriaki dan normalisasi kekerasan
		2. Rendahnya literasi dan kesadaran hukum masyarakat
		3. Belum optimalnya layanan perlindungan dan pendampingan korban
		4. Kurangnya SDM terlatih dan terintegrasi
		5. Minimnya pencegahan berbasis komunitas.
3	Belum optimalnya pemenuhan hak anak	1. Masih rendahnya kesadaran keluarga dan masyarakat akan hak anak.
		2.Terbatasnya fasilitas dan layanan ramah anak .
		Kurangnya ketersediaan data anak secara terpadu
		Belum optimalnya koordinasi lintas perangkat daerah dan lembaga terkait
		Keterbatasan anggaran khusus untuk program perlindungan dan pemenuhan hak anak

Berdasarkan uraian di atas dan data informasi lain yang telah dikaji dan dianalisis, maka akar permasalahan dari permasalahan pembangunan Dinas Sosial, P2PA dapat dirincikan sebagai berikut:

1. Keterpaduan Penanganan PMKS/PPKS dalam Penanggulangan Kemiskinan
2. Peningkatan Kesetaraan dan Keadilan Gender serta Pemenuhan Hak Anak

2.2.2. Telaahan Dokumen Lainnya

5.1. Telaahan RPJMN 2025-2029

Menelaah isu-isu baik global maupun nasional yang ada dalam dokumen RPJMN yang dapat memengaruhi perangkat daerah baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam bagian ini juga dijelaskan program-program dalam RPJMN yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

5.2. Telaahan Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia

Berdasarkan Rencana strategis Kementerian Sosial RI yang mendukung visi dan misi Presiden khususnya bidang sosial. Visi Kementerian Sosial Republik Indonesia, selama 5 (lima) tahun kedepan “ Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong “

Visi kementerian Sosial ini merupakan turunan langsung dari visi nasional yang dijabarkan melalui Asta Cita, khususnya pada poin – poin berikut :

1. Asta Cita ke 4
 - Memperkuat pembangunan SDM, kesetaraan gender dan pemberdayaan penyandang disabilitas.
 - Indikatif program Kemensos : peningkatan kualitas SDM pengelola sosial, perluasan perlindungan difabel.
2. Asta Cita ke 6
 - Pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan sejak dari desa.
 - Indikatif program kemensos : penggunaan basis data terpadu, PKH, program lanjut usia, serta perbaikan panti sosial.

Sasaran Utama Renstra Kemensos RI :

1. Penuntasan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif dan tepat sasaran ;
2. Peningkatan efektivitas dan efisien penyaluran bantuan sosial
3. Penguatan pemberdayaan ekonomi kelompok rentan
4. Pemerataan akses layanan sosial di desa/kelurahan
5. Rehabilitasi sosial yang berkualitas dan memenuhi SPM
6. Perlindungan sosial adaptif terhadap bencana dan krisis sosial.
7. Modernisasi tata kelola public dan transformasi digital layanan sosial.

5.3. Telaahan Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Berdasarkan Rencana strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI yang mendukung pembangunan Kabupaten Demak, maka program dari Renstra Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia di Kabupaten Demak adalah dalam pelaksanaan pembangunan perspektif gender untuk mendukung tercapainya pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk manusia baik laki-laki maupun perempuan. Renstra Kemen PPPA 2025 -2029 mengangkat isu penting yaitu Kekerasan terhadap perempuan dan anak, perkawinan anak, pemberdayaan ekonomi perempuan, dampak perubahan iklim terhadap kelompok rentan , dan implementasi system satu data perempuan dan anak.

Rencana Kerja Kemen PPPA 2025 – 2029 menitikberatkan pada 19 fokus prioritas utama, antara lain :

1. Penguatan regulasi teknis pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak .
2. Pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan dan anak.
3. Pengembangan SIMFONI PPA (Sistem Informasi Manajemen Online) untuk manajemen kasus dan data .
4. Perecepatan PUG di kementerian / lembaga.
5. Pendanaan Dak fisik dan Non Fisik PPA di daerah.
6. Koordinasi strategis dalam berbagai regulasi dan program prioritas seperti :
 - Kesejahteraan Ibu dan anak 1000 Hari Pasca Kelahiran (HPK)
 - Kabupaten Layak Anak (KLA)
 - Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS, KDRT, TPPO)
 - Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA).

5.4. Telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah yang mendukung visi dan misi Gubernur Jawa Tengah, untuk mencapai visi Gubernur tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya, maka tujuan dari Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah . adalah :

1. Menjadi acuan arah program dan kegiatan selama 2025 – 2029
2. Menetapkan ukuran keberhasilan layanan social.
3. Membangun sinergi Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan.
4. Membangun layanan dasar, data DTKS dan mitigasi bencana
5. Menegakkan kemandirian melalui kegiatan produktif dan jaminan sosial.
6. Mengoptimalkan tata kelola dan akurasi data sosial.

Sasaran merupakan hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah . Sasaran Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

1. Menurunkan tingkat kemiskika dari kisaran 9,00 – 9,66 % pada tahun 2025 menjadi 7,25 – 7, 90 pada tahun 2029.
2. Meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan social ketenagakerjaan dari sebesar 39,97 % di tahun 2025 menjadi 48, 05 % di tahun 2029.
3. Meningkatkan persentase penyandanga disabilitas bekerja di sector formal dari 20 % ke 27 % pada tahun 2029.

5.5. Telaahan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah

Mengintegrasikan urusan PPPA dan Keluarga Berencana (Dalduk KB) sebagai isu strategis dalam RPJMD, sejalan dengan RPJMN dan prioritas nasional. Ditekan Pengarusutamaan gender (PUG) , pemenuhan hak anak, pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak agar didukung pendanaan (DAK Fisik & Nonfisik).

Tujuan Renstra Dinas PPPA Provinsi Jawa Tengah adalah :

- Meningkatkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak
- Meningkatkan kualitas perlindungan perempuan dan anak.

Sasasaran Renstra Dinas PPPA Provinsi Jawa Tengah adalah:

- Meningkatnya peran perempuan dan pemenuhan hak anak dalam pembangunan
- Menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

5.6. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditujukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Sosial P2PA . Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Sosial P2PA dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Sosial P2PA dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, Dinas Sosial P2PA dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut. Adapun pemanfaatan pengembangan wilayah Kabupaten Demak berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Demak untuk kawasan pertanian berkelanjutan dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 3.2

Indikasi Program RTRW Kabupaten Demak Tahun 2025-2029

No	Program Utama	Lokasi	Sumber dana	Biaya	Instansi Pelaksana
NIHIL					

5.7. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Seiring dengan pertambahan penduduk yang semakin meningkat pada saat ini, permasalahan lingkungan juga semakin kompleks. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan peningkatan kesadaran masyarakat guna mengutamakan kegiatan-kegiatan pembangunan yang selalu mengutamakan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan KLHS isu yang terkait dengan Dinas Sosial P2PA adalah terkait Isu Stretegis Pilar Sosial

Tabel 3.2
Tema Isu KLHS terhadap Perangkat Daerah. Dinas Sosial P2PA Kabupaten Demak

TEMA ISU	ISU-ISU YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS
Pilar Sosial	
Tujuan 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk di Manapun	Masih tingginya persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur
Tujuan 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	1. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah menurun dan masih dibawah target.
	2.Masih kurangnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan
	3.Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial menurun
Pilar Ekonomi	
Tujuan 10 Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antar Negara	Masih tingginya persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur
Pilar Hukum	
Tujuan 16 Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai	1. Masih adanya kejadian kekerasan terhadap anak laki-laki dan perempuan.

TEMA ISU	ISU-ISU YANG MASUK KRITERIA STRATEGIS
untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua tingkatan	
	2.Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) belum mencapai target nasional

Tabel 3.3
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang Sesuai dengan Wewenang Perangkat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2029

Dinas Sosial P2PA

Pilar Sosial

No	Indikator	Target					Target Perpres 59/2017		Skenario upaya
		2025	2026	2027	2028	2029			
1.3.1	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas	79.77	83.81	87.86	91.91	95.95	Meningkat menjadi 17,12%	-	Integrasi disabilitas dalam dokumen perencanaan
1.3.2	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	NA	NA	NA	NA	NA	Menurun menjadi 2,8 juta 5	--	Perbaikan dan pemutakhiran DTKS
5.1.1	Jumlah kebijakan yg responsive gender mendukung pemberdayaan perempuan	4	5	6	7	8	Meningkat banyak	-	Integrasi PUG dalam dokumen perencanaan daerah.

No	Indikator	Target					Target Perpres 59/2017	Skenario upaya	
		2025	2026	2027	2028	2029			
							16 dokumen		
5.2.1	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	0%	0%	0%	0%	0%	Menurun	-	Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Pencegahan Kekerasan - Peningkatan akses terhadap layanan perlindungan terpadu
5.2.1	Prevelensi kekerasan terhadap anak perempuan	0,44	0	0	0	0	Menurun menjadi kurang dari 20,48%		Penguatan regulasi dan kebijakan perlindungan anak, pencegahan kekerasan di lingkungan pendidikan dan keluarga .
5.2.2	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yg mendapat layanan komprehensif	100	100	100	100	100	Meningkat menjadi 70 %		Penguatan Sistem Layanan Terpadu, Peningkatan Regulasi dan SOP Layanan Komprehensif, Penguatan Sumber Daya Manusia & Jejaring Layanan. Penguatan Pelaporan & Sistem Informasi
5.5.1	Proporsi kursi yg diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat , parelemen daerah dan pemerintah daerah	10	11	13	14	16	Meningkat menjadi 17 %		Penguatan Regulasi dan Kebijakan Afirmasi Gender. Penguatan Kapasitas Perempuan Calon Pemimpin. Peningkatan Partisipasi Politik Perempuan Melalui Kampanye Publik
5.5.2	Proporsi perempuan yg berada di posisi managerial	55.3	61.75	68.2	74.65	81.1	Meningkat		- Penguatan Kebijakan Afirmasi Kesetaraan Gender dalam Kepemimpinan. - Peningkatan Kapasitas Perempuan Menuju Kepemimpinan. - Mendorong Kesetaraan Gender

No	Indikator	Target					Target Perpres 59/2017	Skenario upaya	
		2025	2026	2027	2028	2029			
								-	di Dunia Usaha dan UMKM. - Monitoring dan Pelaporan Keterwakilan Perempuan. - Kampanye Kesadaran Gender dalam Kepemimpinan

Sumber: Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Demak

Pilar Ekonomi

No	Indikator	Target					Target Perpres 59/2017	Skenario upaya	
		2025	2026	2027	2028	2029			
1.3.1	Proporsi penduduk yg hidup dibawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas	NA	NA	NA	NA	NA	Menurun	-	Pemetaan Data Kemiskinan Multidimensi yang Terdisagregasi - Penguatan Program Perlindungan Sosial Inklusif

Sumber: Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Demak

Pilar Hukum

No	Indikator	Target					Target Perpres 59/2017	Skenario upaya	
		2025	2026	2027	2028	2029			
16.2.1	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yg mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologi dari pengasuh dalam setahun terakhir	NA	NA	NA	NA	NA	Menurun	-	Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dan Penyandang Disabilitas - Penguatan Akses Layanan Dasar dan Infrastruktur Inklusif

No	Indikator	Target					Target Perpres 59/2017	Skenario upaya	
		2025	2026	2027	2028	2029			
16.2.1	Prevelansi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan	0.08%	0.06%	0.05%	0.03%	0.02%	Menurun	-	Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Pendidikan, Keluarga, dan Masyarakat. Penanganan & Pemulihan Korban Kekerasan Anak. Penguatan Data & Pelaporan Kasus Kekerasan Anak
16.7.1	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	13	14	15	16	17	Meningkat	-	Penguatan Regulasi dan Kebijakan Afirmasi Gender. Pengembangan Kapasitas dan Pelatihan Perempuan Calon Legislatif. Kampanye Kesadaran dan Dukungan Publik. Kemitraan dengan Parpol dan Organisasi Masyarakat Sipil.
16.7.1	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (esl I dan II)	5	5	5	5	5	Meningkat	-	Penguatan Kebijakan Afirmasi dan Regulasi Internal. Pengembangan Kapasitas dan Leadership. Pemantauan dan Evaluasi Keterwakilan Perempuan

Sumber: Laporan KLHS RPJMD Kabupaten Demak

5.8. Telaahan Dokumen Lainnya (Misal Renaksi/Rinduk/Roadmap dokumen lainnya yang berkaitan dengan tusi PD).

- Rencana Aksi (Renaksi) Dinas sosial P2PA Kabupaten Demak tahun 2023 – 2024.

Isi utama : Renaksi berisi program dan kegiatan prioritas dalam dua tahun sebagai implementasi Renstra periode sebelumnya .

Telaahan :

- ☐ Banyak program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yg sudah berjalan, namun perlu peningkatan kualitas dan jangkauan.
 - ☐ Terdapat kebutuhan penguatan kapasi SDM dan sarana – prasarana layanan sosial.
 - ☐ Sinkronisasi program dengan kebijakan provinsi dan pusat masih perlu ditingkatkan.
- Rencana Induk (Rinduk) Pembangunan Kabupaten Demak 2020 – 2040.

Isi utama : Rinduk merupakan dokumen strategis jangka panjang yang mengarahkan pembangunan daerah secara menyeluruh , termasuk bidang sosial dan pemberdayaan.

Telaahan :

- ☐ Rinduk menegaskan pentingnya penguatan perlindungan sosial, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan perempuan sebagai pilar pembangunan inklusif.
 - ☐ Dokumen ini menggarisbawahi perlunya kolaborasi lintas sector dan peningkatan kapasitas kelembagaan.
- Roadmap Pengarusutamaan Gender Kabupaten Demak 2023 – 2028

Isi Utama : Roadmap ini menguraikan langkah –langkah strategis untuk mencapai kesetaraan gender dalam berbagai sector pembangunan.

Telaahan :

- ☐ Roadmap menekankan target peningkatan keterwakilan perempuan , pencegahan kekeasan berbasis gender dan akses layanan sosial yag ramah gender.
 - ☐ Menyediakan kerangka monitoring dan evaluasi yang bias diadopsi Dinas Sosial P2PA.
- Rencana Aksi Nasional (RAN) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2024 – 2029.

Isi Utama : RAN ini menjadi pedoman nasional dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Telaahan :

- ☐ RAN menyediakan standar pelayanan dan target capaian yang perlu dijadikan acuan daerah.
 - ☐ Ada penekanan pada penguatan layanan perlindungan anak, penanganan kekerasan dan pemberdayaan ekonomi perempuan.
- Dokumetasi Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI 2025-2029.

Isi Utama : Dokumen Renstra Kemen PPA menetapkan arah kebijakan nasional , prioritas program dan target kinerja.

Telaahan :

- ☐ Renstra kemen PPA mengarahkan penguatan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berbasis hak dan inklusi nasional.
- ☐ Menyediakan framework penguatan kelembagaan dan pelibatan masyarakat.

Bottom of Form

5.9. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati-Wakil Bupati Terpilih

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029, visi Kabupaten Demak untuk periode 2025-2029 sebagai berikut:

“Demak Semakin Bermartabat, Maju dan Sejahtera”

Dinas Sosial P2PA secara langsung berkontribusi membantu Bupati-Wakil Bupati dalam melaksanakan misi ke 5 Memperkuat Ketahanan Sosial Dan Lingkungan Yang Inklusif Dan Berkelanjutan pada tujuan Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, aman dan nyaman, dan sasaran 1. Meningkatnya pengentasan kemiskinan dan kehidupan yang berkualitas sasaran 2. Mewujudkan keluarga berkualitas dan penduduk yang tumbuh seimbang dan Indikator yang diacu Dinas Sosial P2PA adalah Tingkat kemiskinan.

Program Prioritas Bupati-Wakil Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial P2PA yaitu :

1. Demak Tangguh dan Lestari .

- Pengentasan kemiskinan melalui peningkatan akses layanan dasar yaitu perluasan jangkauan bantuan sosial inklusif (PKH, BPNT, BSTD) untuk perempuan rentan, lansia terlanter, disabilitas dan anak-anak rentan.
- Perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan yaitu peran Dinas Sosial P2PA dalam pemberdayaan perempuan rentan, korban KDRT, lansia dan disabilitas melalui pelatihan dan akses modal.

2.2.3. Penentuan Isu-Isu Strategis Dinas Sosial P2PA

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, telaahan RPJMN, Renstra Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Renstra Kementerian Pemberdayaan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, Renstra Dinas Sosial P2PA Provinsi Jawa Tengah, telaahan Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Demak, telaahan kajian lingkungan hidup strategis, dan telaahan Visi-Misi dan Program Prioritas Bupati-Wakil Bupati terpilih, maka dapat dirumuskan isu-isu strategis pembangunan Dinas Sosial P2PA sebagai berikut:

Tabel 3.4
Isu Perangkat Daerah
Dinas Sosial P2PA Kabupaten Demak Tahun 2025-2029

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHSyang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Startegis PD
			Global	Nasional	Regional	
2. Kewenangan PD menanggulangi kemiskinan yaitu potensi sumber daya sosial, potensi kelembagaan (pendamping sosial & TKSK), Perlindungan perempuan dan anak , pemberdayaan sosial ekonomi (UMKM & Pemberdayaan ekonomi perempuan rentan), Tanggap bencana sosial dukungan dari SDM Tagana dan relawan local.	1. Pelayanan rehabilitasi sosial kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)/Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) masih kurang Ambi intermediate out come PD	Cari KLHS isu yg sesuai dinsos	RPJMN lampiran 1	RPJMN lampiran 1	Rpjmd provinsi	Kemiskinan dan Kesempatanime Kerja Immediate oute come pokin
Ambil dri isu daerah	2. Belum menyeluruhnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial PMKS/PPKS					
	3. Belum optimalnya peran, partisipasi dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan					Meningkatkan pembangunan gender
	4. Masih adanya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak					

Potensi Daerah yang Menjadi kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHSyang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang relevan dengan PD			Isu Startegis PD
			Global	Nasional	Regional	
	5. Belum optimalnya pemenuhan hak anak					

Sumber:

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi RPJMD. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak . Adapun tujuan dan sasaran Dinas Sosial P2PA untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1. Mengurangi kedalaman kemiskinan
- 2. Meningkatkan Pembangunan Gender

Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

- 1. Meningkatnya jaring pengaman sosial.
- 2. Mewujudkan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak
- 3. Meningkatkan Pemberdayaan Gender
- 4. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja di Dinsosp2pa
- 5. Meingkatnta Tata Kelola Pemerintahan di Dinsosp2pa

Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial P2PA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Baseline		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					Keterangan
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Meningkatnya pengentasan kemiskinan dan kehidupan yang berkualitas	mengurangi kedalaman kemiskinan	-	Indeks kedalaman kemiskinan	%	1.95	NA	1.98	1.99	2.10	2.15	2.20	ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran atau pendapatan penduduk miskin terhadap garis kemiskinan, yang dinyatakan sebagai persentase dari garis kemiskinan.
		meningkatnya jaring pengaman sosial	persentase PPKS yang mandiri.	%	1.67	NA	2.09	2.22	2.31	2.33	2.20	Jumlah penanganan PPKS dibagi dengan populasi PPKS dikali 100 persen
Melwujudkan keluarga berkualitas dan penduduk	meningkatkan pembangunan gender		Indeks Pembangunan Gender (IPG))	%	91.25	NA	92.38	92.47	92.51	92.65	92.67	Indikator komposit yg menunjukkan kesetaraan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Baseline		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					Keterangan
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
yang tumbuh seimbang												capaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam 3 dimensi utama pembangunan manusia : kesehatan, pendidikan, standart hidup layak
		Mewujudkan Perlindungan dan Pemenuh Hak Anak	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	%	64.99 Target IPA	NA	65.97	66.80	67.70	68.89	68.92	Indeks Komposit Kesejahteraan Anak diganti ke Indeks Perlindungan Anak (IPA / 2022) Inmendagri) sesuai KK RPJMD
		Meningkatkan Pemberdayaan Gender	IDG	%	66.22	NA	68.78	68.80	68.85	69.02	69.02	Tiga komponen dalam IDG yaitu keterlibatan perempuan dalam

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Baseline		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					Keterangan
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan
Meningkatnya Pengendalian Internal Pemerintah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik Dinsos P2PA		Indeks Kepuasan Masyarakat DINSOS P2PA	%	89.02	NA	89.02	89.03	89.04	90.05	90.06	Ukuran kuantitatif terhadap tingkat kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan publik yg diberikan oleh Dinsos P2PA, dihitung berdasarkan penilaian responden atas beberapa unsur pelayanan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	Satuan	Baseline		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					Keterangan
					2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Dinas Sosial P2PA		%	100	100	100	100	100	100	100	Jumlah aduan yg ditindaklanjuti dibagi jumlah aduan yg masuk dikali 100

Keterangan:

19	Sasaran dalam dokumen RPJMD yang dapat didukung oleh PD terkait
20	Tujuan PD minimal 1 kalimat tujuan
21	Sasaran Perangkat Daerah
22	Indikator tujuan maupun sasaran
23	Satuan dari indikator
24	Target indikator
25	Target indikator
26	Target indikator
27	Target indikator
28	Target indikator
29	Target indikator
30	Dapat diisi definisi operasional atau rumus indikator

3.2. Setrategi dan arah kebijakan

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Dinas Sosial, P2PA mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

3.2.1. Strategi

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Sosial P2PA dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Strategi Renstra Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 – 2029 yaitu :

1. Peningkatan Pemerataan perlindungan sosial masyarakat pada perlindungan sosial masyarakat pada masyarakat kurang mampu dan kaum marjinal yang adaptif dan integratif.
2. Peningkatan pengarusutamaan gender pada program pembangunan daerah.

Tabel 3.2.

Dinas Sosial, P2PA Kabupaten Demak Tahun 2025-2029

TAHAP I 2026	TAHAP II 2027	TAHAP III 2028	TAHAP IV 2029	TAHAP V 2030
- Mengurangi Beban Pengeluaran Kemiskinan	- Mengurangi Beban Pengeluaran Kemiskinan	- Mengurangi Beban Pengeluaran Kemiskinan	- Mengurangi Beban Pengeluaran Kemiskinan	- Mengurangi Beban Pengeluaran Kemiskinan
- Meningkatkan Kemandirian PPKS (Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial)	- Meningkatkan Kemandirian PPKS (Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial)	- Meningkatkan Kemandirian PPKS (Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial)	- Meningkatkan Kemandirian PPKS (Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial)	- Meningkatkan Kemandirian PPKS (Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial)
- Mempercepat Penanganan Pasca Bencana	- Mempercepat Penanganan Pasca Bencana	- Mempercepat Penanganan Pasca Bencana	- Mempercepat Penanganan Pasca Bencana	- Mempercepat Penanganan Pasca Bencana
- Meningkatkan Kelembagaan Pengarutasamaan Gender (PUG)	- Meningkatkan Kelembagaan Pengarutasamaan Gender (PUG)	- Meningkatkan Kelembagaan Pengarutasamaan Gender (PUG)	- Meningkatkan Kelembagaan Pengarutasamaan Gender (PUG)	- Meningkatkan Kelembagaan Pengarutasamaan Gender (PUG)
- Meningkatkan Efektifitas Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak dari berbagai tindak kekerasan	- Meningkatkan Efektifitas Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak dari berbagai tindak kekerasan	- Meningkatkan Efektifitas Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak dari berbagai tindak kekerasan	- Meningkatkan Efektifitas Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak dari berbagai tindak kekerasan	- Meningkatkan Efektifitas Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak dari berbagai tindak kekerasan
- Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	- Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	- Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	- Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak	- Meningkatkan Pemenuhan Hak Anak
- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Daerah	- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Daerah	- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Daerah	- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Daerah	- Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Daerah
- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah	- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Perangkat Daerah

3.2.2. Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Sosial P2PA agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Sosial P2PA merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Dinas Sosial P2PA .

Tabel 3.3.
Arah Kebijakan Dinas Sosial P2PA Tahun 2025-2029

No.	Operasionalisasi NSPK/ Sasaran RPJMD yg relevan	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra	keterangan
1.	Meningkatnya pengentasan kemiskinan dan kehidupan yang berkualitas	• Peningkatan pendapatan Masyarakat miskin melalui peningkatan akses permodalan • Mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin melalui peningkatan bantuan sosial, perluasan penyediaan jaminan sosial, pemberian subsidi layanan dasar, bantuan pendidikan, dan menjaga stabilitas harga • Mengurangi kantong kemiskinan melalui pemenuhan infrastruktur dasar khususnya bagi kelompok pendudukrentan, menumbuhkan pusat perekonomian baru, dan mengurangi risiko bencana • Sinergi kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan melalui pemanfaatan satu data kemiskinan dan pengarusutamaan perencanaan dan penganggaran pengetasan kemiskinan.	• Peningkatan kualitas program pelayanan dan rehabilitasi sosial • Pemberdayaan masyarakat melalui upaya-upaya pemberdayaan PMKS dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) • Optimalisasi pemanfaatan sumber daya dan pelayanan kesejahteraan sosial • Penguatan kolaborasi dengan berbagai stakeholder • Pengeembangan inovasi program sosial yang berkelanjutan • Peningkatan koordinasi antar instansi dan unit terkait dalam penanganan masalah sosial • Membangun kesadaran sosial, modal sosial dan rasa kepercayaan masyarakat	
	Terwujudnya keluarga berkualitas dan penduduk yang tumbuh seimbang	• Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal • Peningkatan pemenuhan hak dan perlindungan anak • Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan	• Peningkatan Pemenuhan hak, perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak • Fasilitasi dan pemberian advokasi gratis terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	

2.			• Penguatan jejaring perlindungan perempuan dan anak	
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan berbasis digital	• Penguatan kelembagaan yang efektif • Peningkatan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi berbasis kinerja dan manajemen risiko • Penguatan manajemen pemerintahan yang adaptif, partisipatif, berorientasi pada hasil, berbasis riset dan risiko • Akselerasi peningkatan kompetensi ASN melalui penguatan manajemen ASN dan Manajemen talenta secara efektif dan efisien • Penguatan pelayanan publik yang cepat, tepat, berbasis digital, terintegrasi serta keterbukaan pelayanan pengaduan masyarakat(open government) • Penguatan layanan kependudukan dan catatan sipil sebagai dasar dalam penyusunan rumusan kebijakan kependudukan • Penguatan integritas setiap penyelenggara pemerintahan dan pembudayaan anti korupsi di masyarakat • Peningkatan kualitas digitalisasi manajemen kearsipan dan arsiparis yang berkompeten • Peningkatan kualitas kebijakan berbasis satu data indonesia	• Peningkatan Perencanaan Kinerja yang baik • Penguatan Pelaporan dan evaluasi kinerja sesuai dengan sumber data yang akurat • Peningkatan pelayanan publik dengan keterbukaan informasi publik • Peningkatan Kompetensi ASN yang berkualitas dengan mengikuti diklat sesuai tugas dan fungsinya • Peningkatan kanal aduan dan tindaklanjut yang cepat dan akurat • Peningkatan pengelolaan kearsipan melalui nilai hasil pengawasan yang tinggi	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial P2PA

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, lokasi, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kabupaten Demak dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2025-2029.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) di mana penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Sosial P2PA untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

4.1.1. Dukungan Program Prioritas Bupati-Wakil Bupati

Dinas Sosial P2PA mendukung pelaksanaan Program Prioritas Bupati-Wakil Bupati pada program prioritas Demak cerdas dan berkarakter dan Demak Tangguh dan Lestari . Penjelasan pelaksanaan program tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Prioritas Perlindungan dan pemberdayaan kelompok rentan
Terdiri dari Kegiatan Prioritas :
 - a. Pemberian bantuan permakanan bagi kelompok rentan, (WRSE, pemulung dan korban tindak kekerasan)
 - b. Pemberian bantuan alat bantu bagi kelompok rentan (Kursi roda bagi WRSE)
 - c. Pemberian alat bantu bagi Disabilitas terlantar, anak terlantar dan lansia terlantar.
 - d. Pemberian permakanan bagi anak terlantar, lansia terlantar, dan Disabilitas terlantar
 - e. Pemberian UEP (Usaha Ekonomi Produktif) bagi Disabilitas terlantar.
 - f. pemberian bantuan sembako kepada anak terlantar yg berada di dalam panti
 - g. Pemberian bantuan bagi anak stunting berupa susu stunting
 - h. pemberian bantuan sembako kepada anak terlantar yg berada di dalam panti
2. Pemberdayaan organisasi pemuda dan perempuan

Terdiri dari Kegiatan Prioritas :

1. Pemberian pelatihan dan bantuan bagi kelompok pemberdayaan ekonomi perempuan

Secara terinci, dukungan terhadap Program Prioritas disajikan dalam Tabel 4.1

Tabel 4.1 Dukungan Program Prioritas Dinas Sosial P2PA Tahun 2025-2030

NO	PP/KP/AP	Indikator	Satuan	Data Awal (2024)	2026		2027		2028		2029		2030		Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Kode	Subkegiatan
KP 1.	Pengentasan Kemiskinan melalui Akses Layanan Dasar Terintegrasi	angka kemiskinan	%	11.89	11,70		11,60		11,50		11,40		11,40			
		Jumlah penerima bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi	Kelompok	42	64	1,892,791,250										
	AP2. Bantuan Iuran JKN dan Jaminan Kesehatan untuk Keluarga Miskin	Jumlah tenaga kerja rentan yang mendapat bantuan BPJS Ketenagakerjaan	orang	20,000	550000	4600000000	550,000	4,600,000,000	550,000	4,600,000,000	550,000	4,600,000,000	550,000	4,600,000,000	1.06.05	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
KP .2	AP4. Bantuan Sosial Tunai & Sembako Bersyarat (BLT DBHCHT)	Jumlah Keluarga yang menerima bantuan Sembako dan dana bantuan keluarga prasejahtera	KK	43,154	39,708	11,912,400,000	39,708	11,912,400,000	39,708	11,912,400,000	39,708	11,912,400,000	39,708	11,912,400,000	1.06.05	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

NO	PP/KP/AP	Indikator	Satuan	Data Awal (2024)	2026		2027		2028		2029		2030		Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Kode	Subkegiatan
	AP5. Pendampingan Sosial & Penguatan Keluarga Rentan	Jumlah Keluarga yang menerima pendampingan edukasi keluarga, konseling gizi & pendidikan anak	KK	240	250	31,250,000	270	33,750,000	300	37,500,000	300	37,500,000	300	37,500,000	1.06.04	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar,
	KP2. PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN KELOMPOK RENTAN															
KP .2	Perlindungan & Pemberdayaan Kelompok Rentan & Marginal	Jumlah kelompok rentan menerima perlindungan dan pendampingan	orang	20000	550,000	4,600,000,000	550,000	4,600,000,000	550,000	4,600,000,000	550,000	4,600,000,000	550,000	4,600,000,000	1.06.05	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga

NO	PP/KP/AP	Indikator	Satuan	Data Awal (2024)	2026		2027		2028		2029		2030		Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Kode	Subkegiatan
		Tersedianya layanan aduan, konseling, dan bantuan hukum	Kasus	28	35	45,000,000	35	47,000,000	35	47,000,000	35	47,000,000	35	47,000,000	2.08.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
			kasus	34	40	65000000	40	67000000	40	67000000	40	67000000	40	67000000	2.08.07	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA (Kekerasan Terhadap Anak)

NO	PP/KP/AP	Indikator	Satuan	Data Awal (2024)	2026		2027		2028		2029		2030		Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Kode	Subkegiatan
		Jumlah difabel, lansia, ODGJ, korban kekerasan, dan minoritas yang dilayani dan diberdayakan	orang	475	670	85,000,000	700	90,000,000	700	90,000,000	700	90,000,000	700	90,000,000	1.06.04	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial
	AP1. Bantuan Alat Bantu & Aksesibilitas untuk Difabel	Jumlah difabel yang mendapat bantuan kursi roda, alat bantu dengar, tongkat, renovasi rumah	orang	69	55	96,250,000	60	105,000,000	60	105,000,000	60	105,000,000	60	105,000,000	1.06.04	Penyediaan Alat Bantu
	AP2. Bantuan Sosial & Pendampingan Lansia dan ODGJ	Jumlah lansia & ODGJ didampingi (Home visit) dan mendapat bantuan paket sembako, terapi dasar,	orang	250	230	80,000,000	230	85,000,000	230	85,000,000	230	85,000,000	230	85,000,000	1.06.04	Penyediaan Permakanan

NO	PP/KP/AP	Indikator	Satuan	Data Awal (2024)	2026		2027		2028		2029		2030		Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Kode	Subkegiatan
		transport layanan kesehatan														
	AP3. Layanan Terpadu Korban Kekerasan Perempuan & Anak	Jumlah kasus yang tertangani	kasus	28	35	45,000,000	35	47,000,000	35	47,000,000	35	47,000,000	35	47,000,000	2.08.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
			kasus	34	40	65,000,000	40	67,000,000	40	67,000,000	40	67,000,000	40	67,000,000	2.08.07	Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan / program/ kegiatan pencegahan KTA (Kekerasan Terhadap Anak)
		Jumlah layanan aktif Konseling, shelter, bantuan hukum,	unit	2	2		2		2		2		2			

NO	PP/KP/AP	Indikator	Satuan	Data Awal (2024)	2026		2027		2028		2029		2030		Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah	
					Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Target	Anggaran	Kode	Subkegiatan
		hotline 24 jam														
	AP4. Pelatihan Keterampilan & Kewirausahaan bagi Kelompok Rentan	Jumlah peserta yang mendapat pelatihan Menjahit, hidroponik, kuliner, servis, digital marketing, Pelatihan Makeup MUA	orang	100	100	40,000,000	100	40,000,000	100	40,000,000	100	40,000,000	100	40,000,000	2.08.04	Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota
1.	Pelindungan dan pemberdayaan anak terlantar dan fakir miskin		anak	200	200	200,000,000	220	220,000,000	250	250,000,000	250	250,000,000	250	250,000,000	1.06.05	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar

4.1.2. Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah

Selain mendukung Program Prioritas Bupati-Wakil Bupati, Dinas Sosial P2PA melaksanakan urusan Sosial dan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Sosial . Program, kegiatan dan subkegiatan dipilih menggunakan teknik *cascading* atas pohon kinerja Perangkat Daerah. Program, kegiatan dan subkegiatan Perangkat Daerah menggunakan nomenklatur yang disebutkan dalam Kepmendagri Nomor 900.1.15.5.3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tabel 4.1.
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan pendanaan
Dinas Sosial P2PA Kabupaten Demak

Bidang Urusan/Program / Outcome/Kegiata n /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Tahun										Keteran gan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
URUSAN SOSIAL													
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH AN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Dinas S o s i a l , P e m b e r d a y a a n Perempuan dan Perlindungan Anak (Dengan Satuan:%)	78.80	78.85	9.503.753. 552	78.87	9.790.007. 492	78.90	10.042.357. 492	78.95	10.227.657. 492	78.99	10.412.957. 492	
P e r e n c a n a a n , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen p e r e n c a n a a n , penganggaran dan laporan kinerja daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	10	10	21.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	10	20.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Dokumen)	2	10	6.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	10	5.000.000	
K o o r d i n a s i d a n Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan													
Bidang Urusan/Program / Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Tahun										Keterangan gan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	(D e n g a n Satuan:Dokumen)												
K o o r d i n a s i d a n Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (D e n g a n Satuan:Dokumen)	2	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	
K o o r d i n a s i d a n Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan L a p o r a n H a s i l Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (D e n g a n Satuan:Laporan)	4	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	4	5.000.000	
A d m i n i s t r a s i Keuangan Perangkat Daerah	P e r s e n t a s e a d m i n i s t r a s i Keuangan Perangkat D a e r a h y a n g terpenuhi (Dengan Satuan:%)	100	100	7.070.313.552	100	7.164.217.492	100	7.164.217.492	100	7.164.217.492	100	7.164.217.492	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (D e n g a n Satuan:Orang/bulan)	27	36	6.270.313.552	36	6.270.313.552	36	6.270.313.552	36	6.270.313.552	36	6.270.313.552	

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan													
Bidang Urusan/Program / Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Satuan:Dokumen)	25	25	800.000.000	25	893.903.940	25	893.903.940	25	893.903.940	25	893.903.940	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan BMD PD yang sudah direkonsiliasi (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terpenuhi (Dengan Satuan:%)	100	100	255.750.000	100	269.000.000	100	291.000.000	100	302.000.000	100	313.000.000	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	80	80	75.750.000	80	76.000.000	80	78.000.000	80	79.000.000	80	80.000.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti	80	80	177.000.000	80	190.000.000	80	210.000.000	80	220.000.000	80	230.000.000	

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan													
Bidang Urusan/Program / Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)												
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Dengan Satuan:Orang)	15	25	3.000.000	25	3.000.000	25	3.000.000	25	3.000.000	25	3.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi (Dengan Satuan:%)	100	100	784.000.000	100	809.000.000	100	834.000.000	100	859.000.000	100	884.000.000	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	7	7	35.000.000	7	40.000.000	7	45.000.000	7	50.000.000	7	55.000.000	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	25	20	250.000.000	20	255.000.000	25	260.000.000	25	265.000.000	25	270.000.000	
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	25	25	15.000.000	25	20.000.000	25	25.000.000	25	30.000.000	25	35.000.000	

Bidang Urusan/Program / Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	5	5	30.000.000	5	35.000.000	5	40.000.000	5	45.000.000	5	50.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Dokumen)	3	3	14.000.000	3	14.000.000	3	14.000.000	3	14.000.000	3	14.000.000	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan T a m u (D e n g a n Satuan:Laporan)	4	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	4	20.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (D e n g a n Satuan:Laporan)	12	12	360.000.000	12	365.000.000	12	370.000.000	12	375.000.000	12	380.000.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (D e n g a n Satuan:Dokumen)	10	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	10	10.000.000	
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan													
Bidang Urusan/Program / Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Berbasis Elektronik pada SKPD	SKPD (Dengan Satuan:Dokumen)												
Pengadaan Barang Milik D a e r a h Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah BMD yang diadakan (Dengan Satuan:Unit)	25	28	794.000.000	28	894.400.000	28	1.034.800.000	28	1.125.200.000	28	1.215.600.000	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	1	1	390.000.000	1	450.000.000	1	550.000.000	1	600.000.000	1	650.000.000	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	8	10	50.000.000	10	55.000.000	10	60.000.000	10	65.000.000	10	70.000.000	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	3	5	154.000.000	5	169.400.000	5	184.800.000	5	200.200.000	5	215.600.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan L a i n n y a y a n g Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	5	10	175.000.000	10	192.500.000	10	210.000.000	10	227.500.000	10	245.000.000	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	2	2	25.000.000	2	27.500.000	2	30.000.000	2	32.500.000	2	35.000.000	

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan													
Bidang Urusan/Program / Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Kantor atau Bangunan Lainnya	Disediakan (Dengan Satuan:Unit)												
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan yang tersedia (Dengan Satuan:%)	100	100	254.000.000	100	275.450.000	100	305.000.000	100	330.500.000	100	356.000.000	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Dengan Satuan:Laporan)	2	2	4.000.000	2	450	2	5.000.000	2	5.500.000	2	6.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (D e n g a n Satuan:Laporan)	12	12	250.000.000	12	275.000.000	12	300.000.000	12	325.000.000	12	350.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase BMD yang terpelihara (Dengan Satuan:%)	100	100	321.690.000	100	354.940.000	100	390.340.000	100	423.740.000	100	457.140.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	1	1	82.000.000	1	90.000.000	1	98.000.000	1	106.000.000	1	114.000.000	

Bidang Urusan/Program / Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
atau Kendaraan Dinas Jabatan	dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)												
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	26	26	84.540.000	26	92.940.000	26	101.340.000	26	109.740.000	26	118.140.000	
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	3	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	8	10	10.000.000	10	15.000.000	10	20.000.000	10	25.000.000	10	30.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	7	7	120.000.000	7	132.000.000	7	146.000.000	7	158.000.000	7	170.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	20	20	10.150.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	20	10.000.000	

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan													
Bidang Urusan/Program / Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	5	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	5	10.000.000	
P R O G R A M P E M B E R D A Y A A N S O S I A L	Persentase PSKS yang diberdayakan (Dengan Satuan:%)	100	100	724.000.00 0	100	1.360.000. 000	100	1.365.000.0 00	100	1.375.000.0 00	100	1.385.000.0 00	
P e n g e m b a n g a n Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial D a e r a h Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta k e g i a t a n P e n g e m b a n g a n Potensi Sumber Kesejahteran Sosial Kab/Kota (Dengan Satuan:Orang)	60	60	699.000.00 0	60	1.335.000. 000	60	1.340.000.0 00	60	1.350.000.0 00	60	1.360.000.0 00	
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	J u m l a h O r a n g Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat K e w e n a n g a n K a b u p a t e n / K o t a (Dengan Satuan:Orang)	50	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	50	50.000.000	
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial K e c a m a t a n K e w e n a n g a n Kabupaten/Kota yang M e n i n g k a t K a p a s i t a s n y a K e w e n a n g a n K a b u	14	14	300.000.00 0	14	300.000.00 0	14	300.000.000	14	300.000.000	14	300.000.000	

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan													
Bidang Urusan/Program / Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	p a t e n / K o t a (Dengan Satuan:Orang)												
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang M e n i n g k a t K a p a s i t a s n y a K e w e n a n g a n K a b u p a t e n / K o t a (D e n g a n Satuan:Keluarga)	150	150	50.000.000	150	55.000.000	150	60.000.000	150	70.000.000	150	80.000.000	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat K e w e n a n g a n Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan K a p a s i t a s n y a K e w e n a n g a n K a b u p a t e n / K o t a (D e n g a n Satuan:Lembaga)	15	15	249.000.000	15	880.000.000	15	880.000.000	15	880.000.000	15	880.000.000	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	P e r s e n t a s e p e n y a n d a n g disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan g e l a n d a n g a n pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Dengan Satuan:%)	100	100	2.342.160.800	100	3.042.000.000	100	3.132.000.000	100	3.132.000.000	100	3.132.000.000	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas	J u m l a h P M Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas	4,341	4491	2.000.560.800	3140	2.680.000.000	3340	2.770.000.000	3340	2.770.000.000	3340	2.770.000.000	

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan													
Bidang Urusan/Program / Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Tahun										Keterangan gan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti (Dengan Satuan:orang)												
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota (Dengan Satuan:Orang)	1,070	2500	800.000.000	1200	800.000.000	1400	850.000.000	1400	850.000.000	1400	850.000.000	
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota (Dengan Satuan:Orang)	520	100	25.732.100	100	30.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	100	35.000.000	
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten / Kota (Dengan Satuan:Orang)	110	65	143.635.700	100	220.000.000	100	220.000.000	100	220.000.000	100	220.000.000	

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan													
Bidang Urusan/Program / Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang M e n d a p a t k a n Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan K a b u p a t e n / K o t a (Dengan Satuan:Orang)	60	120	60.745.000	120	700.000.000	120	700.000.000	120	700.000.000	120	700.000.000	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan K a b u p a t e n / K o t a (Dengan Satuan:Orang)	370	180	490.165.000	710	500.000.000	710	500.000.000	710	500.000.000	710	500.000.000	
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan K e w e n a n g a n K a b u p a t e n / K o t a (Dengan Satuan:Orang)	100	60	200.000.000	240	100.000.000	240	100.000.000	240	100.000.000	240	100.000.000	
Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas K e w e n a n g a n K a b u	75	80	30.000.000	80	30.000.000	80	30.000.000	80	30.000.000	80	30.000.000	

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan													
Bidang Urusan/Program / Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	p a t e n / K o t a (Dengan Satuan:Orang)												
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar K e w e n a n g a n K a b u p a t e n / K o t a (Dengan Satuan:Orang)	50	60	40.000.000	80	40.000.000	80	40.000.000	80	40.000.000	80	40.000.000	
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan K e w e n a n g a n K a b u p a t e n / K o t a (Dengan Satuan:Orang)	200	200	18.100.000	200	50.000.000	200	50.000.000	200	50.000.000	200	50.000.000	
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang M e n d a p a t k a n Pelayanan Kedaruratan K e w e n a n g a n K a b u p a t e n / K o t a (Dengan Satuan:Orang)	80	48	115.599.000	80	120.000.000	80	150.000.000	80	150.000.000	80	150.000.000	
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang M e n d a p a t k a n Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan K a b u p a t e n / K o t a (Dengan Satuan:Orang)	100	140	54.150.000	150	30.000.000	150	35.000.000	150	35.000.000	150	35.000.000	

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan													
Bidang Urusan/Program / Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Rehabilitasi Sosial Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Penerima manfaat Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya Bukan HIV/AIDS dan N a p z a y a n g menerima layanan Rehabilitasi Sosial di Luar Panti (Dengan Satuan:orang)	449	450	341.600.000	450	362.000.000	450	362.000.000	450	362.000.000	450	362.000.000	
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan K e w e n a n g a n K a b u p a t e n / K o t a (Dengan Satuan:Orang)	48	48	5.705.000	50	12.000.000	50	12.000.000	50	12.000.000	50	12.000.000	
Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang M e n d a p a t k a n Pelayanan Kedaruratan K e w e n a n g a n K a b u p a t e n / K o t a (Dengan Satuan:Orang)	48	48	16.420.000	48	20.000.000	48	20.000.000	48	20.000.000	48	20.000.000	
Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang M e n d a p a t k a n Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan K a b u p a t e n / K o t a (Dengan Satuan:Orang)	50	50	32.725.000	40	15.000.000	40	15.000.000	40	15.000.000	40	15.000.000	

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan													
Bidang Urusan/Program / Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Tahun										Keterangan gan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten / Kota (Dengan Satuan:Orang)	10	10	25.300.000	20	44.000.000	20	44.000.000	20	44.000.000	20	44.000.000	
Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten / Kota (Dengan Satuan:Orang)	40	48	6.735.000	20	6.000.000	20	6.000.000	20	6.000.000	20	6.000.000	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota (Dengan Satuan:Orang)	45	45	118.000.000	80	150.000.000	80	150.000.000	80	150.000.000	80	150.000.000	
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten	11	13	45.000.000	60	20.000.000	60	20.000.000	60	20.000.000	60	20.000.000	

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan													
Bidang Urusan/Program / Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Tahun										Keterangan gan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
HIV/AIDS dan NAPZA	u p a t e n / K o t a (Dengan Satuan:Orang)												
Fasilitasi Pembuatan N o m o r I n d u k Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang M e m b u t u h k a n Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan K a b u p a t e n / K o t a (Dengan Satuan:Orang)	50	50	4.930.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	50	10.000.000	
Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar K e w e n a n g a n K a b u p a t e n / K o t a (Dengan Satuan:Orang)	40	50	4.745.000	25	10.000.000	25	10.000.000	25	10.000.000	25	10.000.000	
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang M e n d a p a t k a n Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan K a b u p a t e n / K o t a (Dengan Satuan:Orang)	50	50	25.000.000	50	20.000.000	50	20.000.000	50	20.000.000	50	20.000.000	

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan													
Bidang Urusan/Program / Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Tahun										Keterangan gan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan K a b u p a t e n / K o t a (Dengan Satuan:Orang)	30	30	33.200.000	30	30.000.000	30	30.000.000	30	30.000.000	30	30.000.000	
Pemberian Layanan Rujukan	J u m l a h O r a n g Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan K a b u p a t e n / K o t a (Dengan Satuan:Orang)	30	30	23.840.000	30	25.000.000	30	25.000.000	30	25.000.000	30	25.000.000	
P R O G R A M PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan penduduk m i s k i n y a n g m e m p e r o l e h perlindungan dan jaminan sosial (Dengan Satuan:%)	-	0	2.650.009.900	0	2.465.009.900	0	2.490.009.900	0	2.466.009.900	0	2.444.009.900	
Pemeliharaan Anak- Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang D i j a n g k a u K e w e n a n g a n Kabupaten/Kota (D e n g a n Satuan:anak)	300	200	250.000.000	200	250.000.000	200	250.000.000	200	250.000.000	200	250.000.000	
Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan K a b u p a t e n / K o t a (Dengan Satuan:Orang)	300	200	250.000.000	200	250.000.000	200	250.000.000	200	250.000.000	200	250.000.000	

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan													
Bidang Urusan/Program / Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan D a e r a h Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir miskin yang masuk dalam pengelolaan data (Dengan Satuan:KK)	266,023	266023	2.400.009.900	266023	2.215.009.900	266023	2.240.009.900	266023	2.216.009.900	3E+05	2.194.009.900	
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Dengan Satuan:Orang)	311,842	826608	1.450.000.000	810076	1.215.000.000	793874	1.190.000.000	777997	1.166.000.000	762437	1.144.000.000	
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang M e n d a p a t k a n Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota (D e n g a n Satuan:Keluarga)	266,023	149187	750.000.000	149187	800.000.000	149187	850.000.000	149187	850.000.000	149187	850.000.000	
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (K P M) y a n g Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan K a b u p a t e n / K o t a (D e n g a n Satuan:Keluarga)			9.9		9.9		9.9		9.9		9.9	
Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	J u m l a h O r a n g Mendapatkan Bantuan P e n g e m b a n g a n Ekonomi Masyarakat K e w e n a n g a n K a b u	-	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	100	200.000.000	

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan													
Bidang Urusan/Program / Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	p a t e n / K o t a (Dengan Satuan:Orang)												
P R O G R A M P E N A N G A N A N BENCANA	Persentase korban bencana yang pulih fungsi sosialnya (Dengan Satuan:%)	100	100	595.000.000	100	705.000.000	100	815.000.000	100	875.000.000	100	915.000.000	
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana yang m e n d a p a t perlindungan sosial (D e n g a n Satuan:korban)	200	1400	395.000.000	1400	455.000.000	1400	515.000.000	1400	575.000.000	1400	615.000.000	
Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang M e n d a p a t k a n Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) K e w e n a n g a n K a b u p a t e n / K o t a (Dengan Satuan:Orang)	200	1000	250.000.000	1000	300.000.000	1000	350.000.000	1000	400.000.000	1000	450.000.000	
Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana K e w e n a n g a n K a b u p a t e n / K o t a (Dengan Satuan:Orang)	75	200	50.000.000	200	50.000.000	200	50.000.000	200	50.000.000	200	50.000.000	

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan													
Bidang Urusan/Program / Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten / Kota (Dengan Satuan:Orang)	200	100	45.000.000	100	50.000.000	100	55.000.000	100	60.000.000	100	65.000.000	
Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten / Kota (Dengan Satuan:Orang)	100	100	50.000.000	100	55.000.000	100	60.000.000	100	65.000.000	100	50.000.000	
Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Masyarakat yang diperdayakan kesiapsiagaan bencana (Dengan Satuan:orang)	25,000	25000	200.000.000	25000	250.000.000	25000	300.000.000	25000	300.000.000	25000	300.000.000	
Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	40	40	200.000.000	40	250.000.000	40	300.000.000	40	300.000.000	40	300.000.000	

Bidang Urusan/Program / Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	p a t e n / K o t a (Dengan Satuan:Orang)												
P R O G R A M PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terawat (Dengan Satuan:%)	100	100	75.000.000	100	80.000.000	100	85.000.000	100	90.000.000	100	95.000.000	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan N a s i o n a l Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang t e r p e n u h i pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan (Dengan Satuan:makam)	90	90	75.000.000	90	80.000.000	90	85.000.000	90	90.000.000	90	95.000.000	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang T e r p e n u h i Pemeliharannya pada T a m a n M a k a m P a h l a w a n K a b u p a t e n / K o t a (D e n g a n Satuan:Makam)	90	90	75.000.000	90	80.000.000	90	85.000.000	90	90.000.000	90	95.000.000	
URUSAN P2PA													
2.08.07	P R O G R A M PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) (Dengan Satuan:%)	100	100	315.000.000	100	370.000.000	100	440.000.000	100	390.000.000	100	

Bidang Urusan/Program / Outcome/Kegiata n /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Tahun										Keteran gan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.08.07.2.01	P e n c e g a h a n Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup D a e r a h Kabupaten/Kota	Jumlah pihak yang terlibat dalam p e n c e g a h a n kekerasan terhadap anak (Dengan Satuan:lem baga)	5	6	100.000. 000	6	120.000. 000	6	140.000. 000	6	40.000.0 00	6	
2.08.07.2.01.0004	A d v o k a s i d a n pendampingan Perangkat D a e r a h d a l a m pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA	Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendamping an dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan K T A (D e n g a n Satuan:Oran g)	50	50	20.000.00 0	50	20.000.00 0	50	20.000.00 0	50	20.000.00 0	50	
2.08.07.2.01.0006	k o o r d i n a s i d a n sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak	jumlah dokumen hasil koordinasi	10	10	80.000.00 0	10	100.000.0 00	10	120.000.0 00	10	20.000.00 0	10	

Bidang Urusan/Program / Outcome/Kegiata n /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Tahun										Keteran gan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	kewenangan kabupaten/kota	dan sinkroni sasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewe nangank abupate n / kota (Dengan Satuan:Dok umen)											
2.08.07.2.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus (Dengan Satuan:layanan)	3	3	165.000.000	3	200.000.000	3	250.000.000	3	300.000.000	3	
2.08.07.2.02.0007	Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan (Dengan Satuan:Layanan)	3	3	165.000.000	3	200.000.000	3	250.000.000	3	300.000.000	3	

Bidang Urusan/Program / Outcome/Kegiata n /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Tahun										Keteran gan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
2.08.07.2.03	Penguatan dan P e n g e m b a n g a n Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penguatan dan P e n g e m b a n g a n Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang memerluka n perlindunga n khusus (D e n g a n Satuan:dok umen)	5	10	50.000.0 00	10	50.000.0 00	10	50.000.0 00	10	50.000.0 00	10	
2.08.07.2.03.0009	koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus t i n g k a t d a e r a h kabupaten/kota	jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindunga	10	10	50.000.00 0	10	50.000.00 0	10	50.000.00 0	10	50.000.00 0	10	

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan													
Bidang Urusan/Program / Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
		n khusus tingkat daerah k a b u p a t e n / k o t a (D e n g a n Satuan:Dok umen)											
P R O G R A M PENGARUSUTAMA AN G E N D E R D A N P E M B E R D A Y A A N PEREMPUAN	Indeks Ketimpangan G e n d e r (I K G) (D e n g a n Satuan:Angka)	70	80	650.000.00 0	80	220.000.00 0	80	240.000.00 0	90	260.000.00 0	100	290.000.00 0	
P e l e m b a g a a n Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah K e w e n a n g a n Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat da e r a h y a n g m e n e r e p k a n pelebagaan PUG (D e n g a n Satuan:Perangkat Daerah)	42	41	650.000.00 0	41	220.000.00 0	41	240.000.00 0	41	260.000.00 0	41	290.000.00 0	
K o o r d i n a s i d a n Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan K e b i j a k a n P e n g a r u s t a m a a n G e n d e r (P U G) K e w e n a n g a n K a b u p a t e n / K o t a	41	41	90.000.000	41	50.000.000	41	55.000.000	41	60.000.000	41	70.000.000	

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan													
Bidang Urusan/Program / Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Tahun										Keterangan gan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
	(D e n g a n Satuan:Dokumen)												
K o o r d i n a s i d a n Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan S i n k r o n i s a s i P e l a k s a n a a n P e n g a r u s t a m a a n G e n d e r (P U G) K e w e n a n g a n K a b u p a t e n / K o t a (D e n g a n Satuan:Dokumen)	41	41	170.000.00 0	41	50.000.000	41	55.000.000	41	60.000.000	41	70.000.000	
Advokasi Kebijakan dan P e n d a m p i n g a n Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	J u m l a h S D M yangmemperoleh advokasi Kebijakan dan P e n d a m p i n g a n Penyelenggaraan PUG (Dengan Satuan:Orang)	41	41	195.000.00 0	41	60.000.000	41	65.000.000	41	70.000.000	41	75.000.000	
Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota	Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota (Dengan Satuan:Orang)	41	41	195.000.00 0	41	60.000.000	41	65.000.000	41	70.000.000	205	75.000.000	
PROGRAM PERLINDUNG AN PEREMPUAN	P e r s e n t a s e Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan l a y a n a n k o m p r e h e n s i f (Dengan Satuan:%)	100	100	1.057.396. 000	100	185.000.00 0	100	215.000.00 0	100	260.000.00 0	100	240.000.00 0	

Bidang Urusan/Program / Outcome/Kegiata n /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Tahun										Keteran gan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
P e n c e g a h a n Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup D a e r a h Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen k e g i a t a n p e n c e g a h a n kekerasan terhadap perempuan (Dengan Satuan:dokumen)	100	100	380.650.00 0	100	90.000.000	100	105.000.00 0	100	125.000.00 0	100	135.000.00 0	
K o o r d i n a s i d a n Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan S i n k r o n i s a s i Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan K e w e n a n g a n K a b u p a t e n / K o t a (D e n g a n Satuan:Dokumen)	41	42	335.650.00 0	50	40.000.000	60	45.000.000	65	60.000.000	70	65.000.000	
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan K e w e n a n g a n Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat A d v o k a s i d a n Pendampingan Layanan P e r l i n d u n g a n P e r e m p u a n K e w e n a n g a n K a b u p a t e n / K o t a (D e n g a n Satuan:Perangkat Daerah)	41	41	45.000.000	41	50.000.000	41	60.000.000	41	65.000.000	41	70.000.000	
Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi	Jumlah layanan bagi k o r b a n y a n g memerlukan rujukan	3	3	656.746.00 0	5	70.000.000	5	80.000.000	10	95.000.000	10	100.000.00 0	

Bab IV Program, Kegiatan, SubKegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan													
Bidang Urusan/Program / Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Perempuan Korban Kekerasan yang M e m e r l u k a n K o o r d i n a s i K e w e n a n g a n Kabupaten/Kota	(D e n g a n Satuan:layanan)												
Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Layanan Pengaduan (Dengan Satuan:Orang)	-	18	289.000.000	20	25.000.000	20	30.000.000	25	40.000.000	25	40.000.000	
K o o r d i n a s i d a n Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan K a b u p a t e n / K o t a (D e n g a n Satuan:Layanan)	3	3	367.746.000	5	45.000.000	10	50.000.000	15	55.000.000	20	60.000.000	
Penguatan dan P e n g e m b a n g a n Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat D a e r a h Kabupaten/Kota	Jumlah lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang disediakan (Dengan Satuan:lembaga)	48	48	20.000.000	42	25.000.000	42	30.000.000	42	40.000.000	42	5.000.000	

Bidang Urusan/Program / Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten/Kota	Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas (Dengan Satuan:Orang)	15	15	20.000.000	25	25.000.000	25	30.000.000	25	40.000.000	25	5.000.000	
P R O G R A M P E N I N G K A T A N KUALITAS KELUARGA	Persentase lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga yang aktif (Dengan Satuan:%)	70	80	960.000.000	100	980.000.000	100	1.000.000.000	100	1.020.000.000	100	1.040.000.000	
Peningkatan Kualitas Keluarga dalam M e w u j u d k a n Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen p e l a t i h a n peningkatan kualitas keluarga (Dengan Satuan:dokumen)	2	2	960.000.000	2	980.000.000	2	1.000.000.000	2	1.020.000.000	2	1.040.000.000	
Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak b a g i K e l u a r g a	Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga K e w e n a n g a n Kabupaten/Kota yang	-	10	270.000.000	10	280.000.000	10	290.000.000	10	300.000.000	10	310.000.000	

Bidang Urusan/Program / Outcome/Kegiata n /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Tahun										Keteran gan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
K e w e n a n g a n Kabupaten/Kota	Tersedia (Dengan Satuan:Dokumen)												
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil P e n g e m b a n g a n Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga K e w e n a n g a n K a b u p a t e n / K o t a (D e n g a n Satuan:Dokumen)	1	1	690.000.00 0	1	700.000.00 0	1	710.000.000	1	720.000.000	1	730.000.000	
P R O G R A M PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan A n a k d a l a m P e r e n c a n a a n , Evaluasi dan/atau P e n y u s u n a n Kebijakan (Dengan Satuan:%)	80	90	776.694.43 0	100	50.000.000	100	60.000.000	100	70.000.000	100	80.000.000	
P e n g u m p u l a n , Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat D a e r a h Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten / Kota yg tersedia (D e n g a n Satuan:dokumen)	65	50	776.694.43 0	50	50.000.000	50	60.000.000	50	70.000.000	50	80.000.000	

Bidang Urusan/Program / Outcome/Kegiatan /Subkegiatan / Output	Indikator Outcome/Output	Baseline 2024	Tahun										Keterangan
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Targe t	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dengan Satuan:Dokumen)	1	1	389.000.000	1	30.000.000	1	35.000.000	1	40.000.000	1	45.000.000	
P e n y a j i a n d a n Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di K e w e n a n g a n Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan K a b u p a t e n / K o t a	50	50	387.694.430	50	20.000.000	50	25.000.000	50	30.000.000	50	35.000.000	

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ante*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output*, *outcome* dan tujuan utama *entitas*. *Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Dinas Sosial P2PA yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2.
Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial P2PA yang Mengacu kepada
Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Demak

NO	Indikator	Satuan	Baseline		Target Capaian Setiap Tahun					Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	89.02	89.02	89.02	89.03	89.04	89.05	89.05	
2	Persentase Aduan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100	
3	indeks kedalaman kemiskinan	%	1.95	1.96	1.98	1.99	2.1	2.15	2.2	
4	persentase PPKS yang mandiri	%	1.67	1,96	2.09	2.22	2.31	2.33	2.47	
5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	91.25	92,14	92.38	92.47	92.51	92.65	92,67	
6	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	%	N/A	N/A	66,12	66,14	66,16	66,17	67,01	
7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	%	66.22	68.7	68.75	68.78	68.8	68,85	69.02	

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial P2PA
Kabupaten Demak

NO	Indikator	Satuan	Baseline		Target Capaian Setiap Tahun					Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Urusan Sosial									
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Dengan Satuan:%)	%	100		100	100	100	100	100	
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota	%	100		100	100	100	100	100	
3	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	67,70		70	72	74	75	76	
4	Persentase PMKS yang tertangani	%	13		15	17	19	21	23	
5	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	13		15	17	19	21	23	
6	Persentase PMKS yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	%	100		100	100	100	100	100	
7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100		100	100	100	100	100	

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Kunci Dinas Sosial P2PA
Kabupaten Demak

NO	Indikator	Satuan	Baseline		Target Capaian Setiap Tahun					Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Urusan P2PA									
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	31,80		40,01	40,05	40,09	40,13	40,17	
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100		100	100	100	100	100	
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	9,34		8,90	8,70	8,50	8,30	8,10	
4	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR	Orang	5	6	12	14	16	18	20	
5	Rasio KDRT	%	0.0068		0,0063	0,0060	0,0058	0,0056	0,0054	
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih	%	100		100	100	100	100	100	

NO	Indikator	Satuan	Baseline		Target Capaian Setiap Tahun					Keterangan
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	di dalam unit pelayanan terpadu									
7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	%	100		100	100	100	100	100	
8	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	%	100		100	100	100	100	100	
9	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	%	100		100	100	100	100	100	
10	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	100		100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kabupaten Demak untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pangan dan pertanian dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2025-2029. Renstra Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Permasalahan Penanganan PMKS/PPKS sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level provinsi hingga kabupaten/kota.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistim pengelolaan pertanian dan pangan yang terpadu, berdayaguna dan berhasilguna.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan data kemiskinan secara optimal dan terpadu.

Semoga Rencana Strategis Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2025 - 2029 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah

satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Kabupaten Demak.

Demak, 2025

Plt. Kepala Dinas Sosial , Pemberdayaan Perempuan
Dan Perlindungan Anak

Kabupaten demak

AGUS HERAWAN, Sip, MM

NIP. 197106121990031004